

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2021**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh

**ADE AYU LESTARI
NIM 105721124317**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka Menyelesaikan Studi pada
Program Strata Satu (S1) Manajemen**

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2021**

07/01/2022

1 eq
Sub. Alumni

R/0034/MAN/22 CD
LES
a'

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Hidup yang diperjuangkan adalah hidup yang rumit dan hidup yang tidak diperjuangkan adalah hidup yang paling rugi"

"Suatu saat nanti karya ini akan menjadi salah satu jejakku yang paling abadi"

"Sebuah persembahan untuk orang-orang yang mencintaiku sepenuh hati"





**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Analisis Kinerja Keuangan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Makassar Provinsi
Sulawesi Selatan

Nama Mahasiswa : ADE AYU LESTARI

No. Stambuk : 105721124317

Program Studi : Manajemen

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan panitia
penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 11 Desember 2021 di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 7 Jumadil Awal 1443 H

11 Desember 2021 M

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Abdul Muttalib, S.E., M.M

Resky Septiani Amin, S.E., M.M

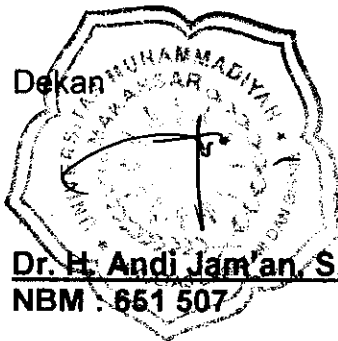
NIDN : 0901125901

NIDN : 0918098001

Mengetahui,

Dekan

Ketua Program Studi



Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si

NBM : 651 507

Muh. Nur Rasyid, S.E., M.M

NBM : 1085576



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama: ADE AYU LESTARI, NIM: 105721124317, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0014/SK-Y/61201/091004/2021 M, tanggal 7 *Jumadil Awal* 1443 H/ 11 Desember 2021 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar SARJANA MANAJEMEN pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Makassar, 7 Jumadil Awal 1443 H
11 Desember 2021 M*

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.A
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., M.ACC
(WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Abdul Muttalib, S.E., M.M
2. Nasrullah, S.E., M.M
3. Amelia Reski Septiani Amin, S.E., M.M
4. Muhammad Nur Abdi, S.E., M.M

Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
* NBM : 651 507



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADE AYU LESTARI
Stambuk : 105721124317
program Studi : Manajemen
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Makassar Provinsi
Sulawesi Selatan

Skripsi Yang Saya Ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI Hasil Karya Sendiri, Bukan Hasil Jiplakan dan Tidak Dibuat Oleh Siapapun.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 7 Jumadil Awal 1443 H
11 Desember 2021 M

Yang membuat pernyataan,



Ade Ayu Lestari
ADE AYU LESTARI
NIM: 105721124317

Mengetahui,



Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM : 651 507

Ketua Program Studi

Muh. Nur Rasyid
Muh. Nur Rasyid, SE., MM
NBM : 1085576

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah selain puji syukur kepada Allah Swt, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan- Nya alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan”.

Untuk semua itu dengan kerendahan hati melalui ucapan sederhana ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai, yang juga telah membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini terutama kepada Orang Tua tercinta yang telah rela berkorban tanpa pamrih dalam membesarkan, mendidik serta mendoakan keberhasilan penulis. Segenap Keluaraga tercinta dan terbaik yang senantiasa memberikan doa. Berikut juga dengan yang terhormat :

1. Kedua orang tua yang sangat berjasa dalam hidup saya, yang selalu memberi apapun yang anaknya inginkan.
2. Bapak Prof, Dr.H, Ambo Asse, M.Ag. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Ismail Rasulong, S.E., MM. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Bapak Muh.Nur Rasyid, S.E., MM. selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Bapak Abdul Muttalib, S.E., M.M selaku pembimbing I dan Ibu Amelia Resky Septiani Amin, S.E., M.M selaku Pembimbing II yang senantiasa

- meluangkan waktunya untuk memberikan pembimbingan, memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan studi.
6. Seluruh staf pengajar, baik dosen maupun asisten dosen, staf pegawai Fakultas Ilmu Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
 7. Pihak Bappeda Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang telah banyak memberikan bantuan pada saat penelitian.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 2021
Yang menyatakan

Ade Ayu Lestari

ABSTRAK

ADE AYU LESTARI. 2021. Analisis Kinerja Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Abdul Muttalib, S.E., M.M dan Pembimbing II Resky Septiani Amin, S.E., M.M

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2019. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yang bersifat analisis deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Analisis keserasian belanja pada Bappeda Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan jika dilihat selama 2017-2019, mengalami dampak yang baik. Pertumbuhan belanja dapat dikatakan bernilai positif karena mengalami kenaikan terhadap pertumbuhan belanja, dapat dilihat dari bertambahnya jumlah belanja. jika dilihat dari total keseluruhannya mengalami pertumbuhan sebesar 3%. Kinerja keuangan dilihat dari analisis efektivitas belanjanya selama tahun sudah cukup efektif. Dapat dilihat dari rata-rata perhitungannya adalah sebesar 87%. Kinerja keuangan dilihat dari efisiensi belanjanya semua angka pada rasio efisiensi menunjukkan angka di bawah 100% bahkan tidak ada yang melebihi dari angka 60% yang menunjukkan kriteria efisiensi belanja yang sangat efisien, sehingga dapat diartikan bahwa tidak ada pemborosan dalam penganggaran belanja. Kinerja keuangan dilihat dari varians belanjanya dapat dikatakan baik, karena realisasi belanja tidak melebihi dari anggaran belanja. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 90% sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 85%. Dengan total rata-rata sebesar 87%.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan

ABSTRACT

ADE AYU LESTARI. 2021. *Financial Performance Analysis of the Regional Development Planning Agency of Makassar City, South Sulawesi Province. Thesis of the Faculty of Economics and Business, Department of Management, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Advisor I Abdul Muttalib S.E., M.M and Advisor II Resky Septiani Amin, S.E., M.M.*

This study aims to describe the financial performance of the Regional Development Planning Agency of Makassar City, South Sulawesi Province in 2017-2019. This type of research is a type of qualitative research, this research was conducted using a qualitative descriptive analysis method. The data used in this research is secondary data.

The analysis of the compatibility of spending in the Bappeda of Makassar City, South Sulawesi Province when viewed during 2017-2019, had an good impact. Expenditure growth can be said to be positive because there is an increase in spending growth, it can be seen from the increase in the amount of spending. when viewed from the total, experienced a growth of 3%. Financial performance seen from the analysis of the effectiveness of spending during the year has been quite effective. It can be seen from the average calculation is 87%. Financial performance is seen from the efficiency of spending, all figures in the efficiency ratio show numbers below 100% and none even exceeds 60% which indicates very efficient spending efficiency criteria, so that it can be interpreted that there is no waste in spending budgeting. Financial performance seen from the expenditure variance can be said to be good, because the realization of expenditure does not exceed the budget. The highest realization occurred in 2017 at 90% while the lowest realization occurred in 2019 at 85%. With a total average of 87%.

Keywords: *Financial Performance*

DAFTAR ISI

SAMPUL	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Teori	8
1. Konsep Dasar Kinerja.....	8
2. Penilaian Kinerja.....	9
3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	14
4. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	15
5. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	19
6. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	23

7. Manfaat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	24
B. Tinjauan Empiris.....	25
C. Kerangka Konsep.....	28
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
C. Sumber Data	30
D. Teknik Pengumpulan Data	30
E. Metode Analisis	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	35
B. Hasil Penelitian.....	40
C. Pembahasan.....	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 1.1	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Kota Makassar...	4
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3.1	Kriteria Penilaian Kinerja Keserasian Belanja	31
Tabel 3.2	Kriteria Penilaian Kinerja Pertumbuhan Belanja.....	33
Tabel 3.3	Kriteria Penilaian Kinerja Eektivitas Belanja.....	33
Tabel 3.4	Kriteria Penilaian Kinerja Efisiensi Belanja	34
Tabel 3.5	Kriteria Penilaian Kinerja Varians Belanja.....	34
Tabel 4.1	Kriteria Penilaian Kinerja Keserasian Belanja.....	41
Tabel 4.2	Rekapitulasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.....	41
Tabel 4.3	Selisih Realisasi Anggaran.....	42
Tabel 4.4	Analisis Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja Tahun Anggaran 2017-2019.....	43
Tabel 4.5	Analisis Belanja Langsung Terhadap Total Belanja Tahun Anggaran 2017-2019.....	44
Tabel 4.6	Analisis Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2017-2019.....	45
Tabel 4.7	Kriteria Penilaian Kinerja Pertumbuhan Belanja.....	47
Tabel 4.8	Analisis Pertumbuhan Belanja Tahun Anggaran 2017-2019.....	48
Tabel 4.9	Kriteria Penilaian Kinerja Efektivitas Belanja.....	49
Tabel 4.10	Rasio Efektivitas Belanja Tahun Anggaran 2017-2019.....	50
Tabel 4.11	Kriteria Penilaian Kinerja Efisiensi Belanja.....	51
Tabel 4.12	Rasio Efisiensi Belanja Tahun Anggaran 2017-2019.....	52
Tabel 4.13	Kriteria Penilaian Kinerja Varians Belanja.....	54

Tabel 4.14 Analisis Varians Belanja Tahun Anggaran 2017-2019.....54

Tabel 4.15 Ringkasan Analisis Kinerja Keuangan Bappeda Kota Makassar
Provinsi Sulawesi Selatan..... 56



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 1.1	Kerangka Konsep	28



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga pemerintah merupakan perkumpulan yang difungsikan untuk memusatkan kepentingan bangsa serta negeri. Organisasi pemerintah dibangun untuk melaksanakan kegiatan layanan bantuan ke daerah secara komprehensif serta setara. Selaku organisasi nirlaba, kantor-kantor pemerintah mempunyai tujuan untuk menawarkan kategori bantuan serta kapasitas untuk menambah layanan tersebut di masa yang akan tiba. Tujuan yang wajib dicapai sebagian besar dituntaskan dalam istilah subjektif, semacam peningkatan keamanan serta kenyamanan, kualitas pembelajaran dan kualitas kesehatan.

Manajemen suatu lembaga hendak senantiasa dihadapkan pada penentuan pilihan untuk apa yang akan tiba. Pilihan positif ataupun negatif yang diambil tergantung pada informasi yang digunakan untuk keterampilan manajemen dalam menganalisis dan menginterpretasikan. Salah satu sumber informasi berarti yang bisa dimanfaatkan oleh manajemen dalam memastikan pilihan tersebut, khususnya keuangan merupakan laporan keuangan. Berkenaan dengan rencana pengeluaran organisasi area publik, anggaran keuangan mencakup rencana berapa bayaran serta berapa banyak uang tunai yang hendak dikumpulkan untuk membiayai rencana tersebut. Laporan keuangan hendak jadi produk akhir dari sesuatu proses akuntansi yang bertujuan untuk menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan untuk beberapa pemakai dalam pengambilan keputusan, baik itu pihak internal ataupun eksternal. Laporan keuangan direncanakan dengan tujuan

supaya laporan realisasi anggaran membagikan informasi realisasi serta rencana keuangan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dibentuk tergantung pada kebutuhan, perkembangan dan kemajuan di bidang pemerintahan, untuk membantu pemerintah daerah melakukan perbaikan di bidang pemerintahan untuk situasi ini semua aspek yang ada dalam proses pengambilan keputusan dan pedoman pembentukan penyusunan anggaran dan belanja daerah agar terlaksana. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat kewilayahan, salah satunya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Bappeda adalah sebuah lembaga teknis khusus daerah di bidang pemeriksaan dan pembinaan daerah yang dimotori oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota melalui sekretariat daerah. Bappeda mempunyai tugas utama membantu Gubernur/Bupati/Wali Kota dalam organisasi pemerintahan daerah.

Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 pasal 1, bahwa laporan kinerja adalah suatu garis besar yang secara sesaat dan menyeluruh mengungkapkan capaian-capaian pameran yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD, selanjutnya dalam peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, bahwa laporan kinerja tersebut merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan wewenang yang diberikan kepada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran.

Seperti yang dikemukakan oleh Gede, E.P (2005:78) pengukuran kinerja keuangan adalah salah satu pendekatan untuk menunjukkan tanggung

jawab, lebih spesifik bagaimana pemerintah daerah, khususnya Bappeda, memberikan tanggung jawab, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan semua aktivitas dan kegiatan yang telah diatur dalam rencana keuangan. Upaya untuk mengembangkan kinerja lebih lanjut harus disertai dengan estimasi kinerja yang dapat diterima dan tentunya baik.

Pengukuran kinerja keuangan dapat dilihat dari Laporan Pengeluaran atau laporan realisasi anggaran yang dapat diakses di Bappeda dengan memanfaatkan beberapa analisis rasio keuangan. Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan perhitungan pelaksanaan semua yang telah digambarkan dalam tahun anggaran tertentu. Pada dasarnya, laporan realisasi anggaran menyajikan garis besar sumber, peruntukan, dan pemanfaatan aset keuangan yang diawasi oleh pemerintah terdekat, yang merupakan pemeriksaan rencana pengeluaran dan pengakuannya dalam satu tahun anggaran. Marja (2015:120)

Tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah sebagai angka efektivitas tidak langsung, namun relatif. Maka pengukuran kinerja anggaran dapat dilihat dengan menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi belanja. pengukuran kinerja anggaran berfungsi untuk menunjukkan efisiensi dan kelayakan pembelanjaan daerah yang digunakan oleh organisasi. Efisiensi adalah proporsi informasi dan hasil yang diidentifikasi dengan pedoman pelaksanaan atau fokus yang telah ditetapkan. Jadi dalam menaksir kinerja organisasi pemerintah, aturan yang digunakan adalah Kemendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 dengan alasan bahwa pedoman itu memperkirakan pelaksanaan pemerintah dari segi keuangan.

Pengukuran kinerja keuangan berikut, juga dapat dilihat dengan menggunakan Analisis Keceragaman Belanja, salah satunya dengan mengevaluasi rasio belanja langsung dan tidak langsung terhadap total belanja. Analisis tersebut diarahkan untuk memutuskan keselarasan antara pengeluaran yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah fokus pada aset mereka yaitu pengeluaran secara ideal. Analisis berikut yang juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah dengan menggunakan analisis varians belanja dan juga pertumbuhan belanja. Varians belanja digunakan untuk melihat seberapa layak dan penyerapan anggaran untuk kegiatan instansi selama satu tahun anggaran, sedangkan analisis pertumbuhan belanja digunakan untuk mengetahui besar anggaran dan realisasi terwujud dalam suatu instansi dapat dilihat seberapa jauh pemenuhan pada belanja kegiatan yang digunakan instansi.

Tampubolon (Desi 2020:3) menyatakan pandangannya tentang kinerja keuangan, yaitu pengakuan kinerja instansi yang disebabkan karena siklus dinamis pengambilan keputusan, karena mencakup pemanfaatan modal, produktivitas dan manfaat dari kegiatan instansi tersebut.

Laporan realisasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar Provinsi Sulawesi-Selatan tahun 2017-2019 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Kota Makassar
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2017-2019

Tahun	Anggaran	Realisasi
2017	3,685,763,117,000	3,312,532,290,887

2018	4,089,589,897,000	3,526,081,002,897
2019	4,176,183,531,400	3,548,006,636,749

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa dalam tiap tahun penggunaan anggaran pada instansi Bappeda Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan. Selalu ada perubahan yang menarik ketika melakukan analisis. Dalam hal ini perubahan dan pertumbuhan dari pengguna anggaran adalah salah satu aspek penting dalam penilaian kinerja keuangan pada instansi.

Jumlah Anggaran Pada Tahun 2017 Sebesar Rp3,685,763,117,000 dengan jumlah belanja yang terealisasi Rp3,312,532,290,887 merupakan belanja yang berasal dari belanja langsung dan tidak langsung.

Jumlah Anggaran Pada Tahun 2018 Sebesar Rp4,089,589,897,000 dengan jumlah belanja yang terealisasi Rp3,526,081,002,897 merupakan belanja yang berasal dari belanja langsung dan tidak langsung.

Jumlah anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp4,176,183,531,400 dengan jumlah belanja yang terealisasi Rp3,548,006,636,749 merupakan belanja yang berasal dari belanja langsung dan tidak langsung.

Laporan Realisasi Anggaran yang diterbitkan pemerintah daerah membagikan informasi yang sangat berguna dalam evaluasi kinerja keuangan daerah. Laporan Realisasi Anggaran jadi salah satu laporan pertanggung jawaban keuangan daerah yang utama, sebab anggaran ialah tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran merupakan perlengkapan berarti yang berfungsi selaku perencanaan serta pengendalian jangka pendek yang efisien dalam organisasi. Anggaran manajemen dapat

menentukan efektivitas dan efisiensi suatu operasi dengan membandingkan anggaran dengan realisasi terkini yang dicapai. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah kinerja Keuangan **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017-2019?**

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan kinerja keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2019

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan pimpinan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar Provinsi Sulawesi-Selatan.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk mahasiswa dan generasi penerus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah pengalaman dan pengetahuan tentang kinerja keuangan pada suatu instansi. Selain itu penelitian ini juga sebagai sarana untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu SDM yang sudah diperoleh di bangku perkuliahan.

4. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi pembaca dan dapat menjadi sumber informasi ataupun pertimbangan bagi instansiserupa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Konsep Dasar Kinerja

Sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara, A.P. (2016:67) kinerja adalah hasil kerja antara kualitas dan jumlah yang dicapai oleh seorang individu dalam melakukan tugas sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya. Kebutuhan dalam setiap organisasi bagi setiap pegawai diperlukan untuk menyelesaikan tanggungjawab dan fungsi secara keseluruhan untuk mencapai tujuan organisasi.

Seperti yang dikemukakan oleh Pasolog, H. (2007:177) kinerja memiliki beberapa bagian, yaitu:

- a. Pencapaian hasil kerja individu atau institusi, yang menyiratkan bahwa kinerja adalah produk akhir dari keuntungan individu atau organisasi.
- b. Dalam melaksanakan tanggungjawabnya, pegawai atau instansi diberikan kedudukan dan tugas, yang mengandung arti bahwa pegawai atau instansi diberi hak dan wewenang untuk ditindaklanjuti, sehingga pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan tujuan masing-masing.
- c. Pekerjaan diselesaikan secara sah, yaitu dalam melaksanakan tugas pegawai atau instansi harus mengikuti standar yang telah ditetapkan.
- d. Pekerjaan tersebut sesuai dengan etika atau moral, menyiratkan bahwa selain memperhatikan standar yang telah ditetapkan, tentunya pekerjaan tersebut harus baik dan bermoral secara keseluruhan.

2. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja merupakan sesuatu metode manajemen dalam memperhitungkan keefektivitasan suatu aktivitas yang dilakukan berlandaskan target, standar, serta kriteria yang sudah diresmikan dalam sesuatu anggaran. Evaluasi kinerja dilakukan bertujuan untuk memperhitungkan hasil kerja, sehingga bisa menolong manajer unit kerja dalam memonitor serta membetulkan kinerja dalam rangka penuhi tuntutan akuntabilitas publik.

Evaluasi kinerja digunakan buat memperhitungkan kemajuan pekerjaan atas pencapaian tujuan serta target yang didetapkan, tercantum informasi efisiensi pemakaian sumber daya dalam menghasilkan barang serta jasa, kualitas barang serta jasa, perbandingan antara hasil serta sasaran, dan yang terakhir merupakan efektivitas kegiatan dalam menggapai tujuan.

Evaluasi kinerja merupakan salah satu tugas berarti untuk dilakukan oleh seorang manajer ataupun pimpinan. Aktivitas penilaian ini berguna, sebab bisa digunakan untuk memperbaiki keputusan- keputusan personal serta membagikan umpan balik untuk para pegawai tentang kinerja mereka.

Penilaian kinerja jadi bagian dari proses pengendalian manajemen yang bisa digunakan selaku perlengkapan pengendalian. Pengendalian manajemen lewat sistem evaluasi kinerja dilakukan dengan metode menghasilkan tata cara hadiah serta hukuman. Sistem pemberian hadiah serta hukuman digunakan selaku perangsang untuk perencanaan strategi. Sistem evaluasi kinerja serta tata cara hadiah serta hukuman

wajib didukung dengan manajemen kompensasi yang mencukupi. Manajemen kompensasi ialah mekanisme berarti untuk menekan serta memotivasi manajer untuk menggapai tujuan organisasi. Insentif negatif bila tujuan tidak tercapai disebut hukuman. Peran penting adanya hadiah dalam suatu organisasi merupakan untuk mendesak tercapainya tujuan organisasi serta untuk menghasilkan kepuasan untuk tiap orang.

Bagi Dedi (2011: 157) Untuk memperhitungkan suatu kinerja hingga dilakukan dengan pengukuran terhadap kinerja, untuk memperhitungkan sukses tidaknya sesuatu organisasi, program ataupun aktivitas, tidak hanya itu yang lebih berarti merupakan apakah sudah menggapai keberhasilan yang sudah ditargetkan pada saat perencanaan. Pengukuran kinerja ialah instrumen yang digunakan untuk menialai hasil akhir penerapan aktivitas terhadap sasaran serta tujuan aktivitas yang sudah diresmikan sebelumnya. Tujuan kinerja sektor publik adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengenali tingkatan ketercapaian tujuan organisasi

Pengukuran kinerja pada organisasi publik digunakan untuk mengenali ketercapaian tujuan organisasi. Evaluasi kinerja berperan selaku tonggak yang menampilkan tingkatan ketercapaian tujuan serta juga menampilkan apakah organisasi berjalan sesuai arah dari tujuan yang diresmikan. Bila terjalin penyimpangan dari arah yang semestinya, pimpinan bisa melaksanakan aksi koreksi serta revisi dengan segera.

b. Sediakan fasilitas pembelajaran pegawai

Pengukuran kinerja ialah pendekatan sistematis serta terintegrasi untuk membetulkan kinerja organisasi dalam rangka menggapai tujuan strategis organisasi dan mewujudkan visi serta misinya. Sistem pengukuran kinerja bertujuan membetulkan hasil dari usaha yang dilakukan oleh pegawai dengan mengaitkannya terhadap tujuan organisasi.

c. Membetulkan kinerja periode-periode selanjutnya.

Pengukuran kinerja dilakukan sebagai sarana pendidikan untuk membetulkan kinerja di masa mendatang. Pelaksanaan sistem pengukuran kinerja dalam jangka panjang bertujuan membentuk budaya berprestasi didalam organisasi. Budaya kinerja ataupun budaya berprestasi bisa diciptakan apabila sistem pengukuran kinerja sanggup menghasilkan suasana organisasi sehingga tiap orang dalam organisasi dituntut untuk berprestasi. Untuk menghasilkan suasana itu, dibutuhkan revisi kinerja secara terus menerus.

d. Membagikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan serta hukuman.

Pengukuran kinerja bertujuan membagikan dasar sistematis bagi manajer untuk membagikan penghargaan, misalnya: peningkatan pendapatan, tunjangan, serta promosi. Atau pun hukuman, misalnya: pemutusan kerja, penundaan promosi serta teguran.

Syafrizal (2014:55) dalam hal perencanaan pembangunan dalam kinerja pemerintah dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Pengaturan jarak jauh

Pengaturan jarak jauh sebagai aturan mencakup waktu 10-25 tahun. Dalam waktu permintaan baru, kemajuan jangka panjang mencakup waktu 25 tahun sebagaimana ditentukan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Untuk sementara, saat ini, rencana kemajuan jangka panjang, baik nasional maupun daerah, mencakup waktu 20 tahun. Bahkan ada jenis penyusunan kemajuan yang berjangka waktu 10 tahun, seperti Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Rencana jarak jauh biasanya disebut sebagai pengaturan sudut pandang yang berisi arah pembangunan secara umum. Pada akhirnya, pengaturan jarak jauh mengandung perspektif yang jauh tentang sistem pengembangan yang siap sesuai dengan keinginan daerah secara keseluruhan.

Pengaturan jarak jauh lebih berskala makro (menyeluruh) dan tidak termasuk program dan kegiatan yang diperinci. Sedangkan bagian yang dibahas meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, dan penataan ruang. Selain itu, penyusunan yang berlarut-larut juga mencakup tahap-tahap perbaikan untuk setiap rentang waktu lima tahun. Hal ini harus dilakukan agar penataan jangka menengah dapat dimanfaatkan sebagai semacam perspektif untuk penataan jangka menengah.

b. Pengaturan Jangka Menengah

Pengaturan jangka menengah biasanya mencakup waktu 4-5 tahun, tergantung pada masa jabatan presiden atau kepala daerah.

Penyusunan jangka menengah memiliki waktu 5 tahun yang disiapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penataan jangka menengah pada dasarnya adalah penggambaran penataan jangka panjang dengan tujuan agar lebih fungsional. Penyusunan jangka menengah juga mencakup tujuan dan sasaran perbaikan kuantitatif dan kualitatif sehingga penyusunannya menjadi lebih terukur dan mudah digunakan sebagai alasan pengamatan dan penilaian.

c. Pengaturan Sesaat

Penataan sesaat biasanya hanya berlangsung selama 1 tahun, sehingga biasa disebut penataan tahunan. Penataan ini pada dasarnya merupakan gambaran dari rencana jangka menengah. Terlebih lagi, program tahunan ini sangat fungsional karena menggabungkan proyek dan kegiatan, lengkap dengan pendanaannya. Pengaturan tahunan ini bahkan menyertakan petunjuk dan fokus pelaksanaan untuk setiap program dan tindakan. Susunan tahunan ini kemudian digunakan sebagai dasar utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja baik pada tingkat nasional (RAPBN) maupun tingkat daerah (RAPBD). Penyusunan tahunan yang mencakup seluruh wilayah disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sedangkan secara khusus untuk suatu wilayah atau bidang disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas peneliti menyimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran.

4. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan adalah produk manajemen dalam pertanggung jawaban penggunaan sumber daya dan sumber dana yang dipercayakan kepadanya. Secara umum, laporan ini menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas dalam satu periode. Dalam konteks daerah, laporan ini ditujukan bagi pengguna laporan di luar pemerintah daerah untuk menilai dan mengambil keputusan. Disini, sumber informasi adalah pemerintah daerah yang bersangkutan.

Laporan keuangan tersebut berisi ringkasan dari suatu proses pencatatan, transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Ukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah strategis, sasaran strategis, inisiatif strategis dan implementasi mampu memberikan kontribusi dalam menghasilkan keuntungan bagi masing-masing instansi, oleh karena itu laporan keuangan sangat penting karena merupakan produk atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi.

Peraturan pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok adalah:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya dalam satu periode tertentu yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan ini mengungkapkan kegiatan Keuangan Pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) / Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD)

Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan unsur yang dicakup dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari:

- 1) Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemda dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemda.

Pendapatan dibagi menjadi 3 kategori:

a) Pendapatan asli daerah

Merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

b) Dana perimbangan

Merupakan dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan belanja negara yang dialokasikan pada daerah untuk membiayai kebutuhan dananya.

c) Lain-lain pendapatan yang sah

Adalah pendapatan lain-lain yang dihasilkan dari dana bantuan dan dana penyeimbang dari pemerintah pusat.

- 2) Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemda.

Belanja dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

a) Belanja Aparatur Daerah

Merupakan belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur, contohnya pembelian kendaraan dinas, pembelian bangunan gedung, dan lain sebagainya.

b) Belanja Pelayanan Publik

Merupakan belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum, contohnya pembangunan jembatan dan jalan raya dan sebagainya.

c) Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan

3) Pembiayaan

Adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemda terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan dikelompokkan menjadi :

a) Sumber penerimaan daerah, yaitu :

Sisa lebih anggaran penerimaan tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan dan transfer dari dana cadangan.

b) Sumber pengeluaran daerah, yaitu :

Pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal, transfer ke dana cadangan dan sisa lebih anggaran tahun sekarang.

b. Neraca

Neraca merupakan laporan yang memberikan gambaran utuh suatu entitas (Pemerintah Daerah) pada suatu titik waktu. Dalam neraca akan tergambar elemen-elemen yang menyusun entitas tersebut, sehingga neraca sering disebut sebagai potret posisi keuangan suatu entitas.

c. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah arus masuk, arus keluar kas dan setara kas pada bendahara umum daerah. Penyajian laporan arus kas adalah untuk menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.

d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan ini menyampaikan ikhtisar pencapaian kinerja selama periode tertentu, kebijakan akuntansi yang digunakan penjelasan masing-masing perkiraan laporan keuangan dan informasi tambahan yang diperlukan. Catatan atas laporan keuangan ini meliputi penjelasan

atau daftar terinci atau suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan.

5. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Setiap pemerintah daerah untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerahnya menggunakan beberapa analisis rasio kinerja keuangan daerah yang antara lain: analisis varians belanja, analisis keserasian belanja, analisis pertumbuhan belanja, rasio belanja langsung terhadap total belanja, rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja, analisis rasio efektivitas dan efisiensi belanja.

a. Analisis Varians Belanja

Analisis varians belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran yang ada pada tahun anggaran yang tersedia di tahun anggaran tersebut. Dalam hal belanja daerah terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah daerah.

Dapat dikatakan baik dari hasil varians ini adalah apabila pemerintah daerah dapat melakukan efisiensi belanja. Apabila pemerintah tidak dapat melakukan efisiensi belanja maka dapat dikategorikan adanya indikasi dari kinerja keuangan belanja daerah yang kurang baik atau dikarenakan adanya jumlah realisasi belanja yang lebih besar dari jumlah anggaran yang ditargetkan.

Selisih realisasi belanja yang dianggarkan yang cukup signifikan bisa memberikan dua kemungkinan, *pertama* hal itu menunjukkan

adanya efisiensi anggaran. *kedua* justru sebaliknya, jika terjadi selisih kurang maka sangat mungkin telah terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga estimasi belanjanya kurang tepat, atau tidak terserapnya anggaran tersebut bisa jadi disebabkan karena ada program atau kegiatan yang tidak dilaksanakan eksekutif padahal sudah diamanahkan dalam anggaran. Rumus pengukuran kinerjanya menurut Mahmudi (2010:157) adalah sebagai berikut:

$$\text{Analisis Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

b. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan. Pertumbuhan belanja daerah menurut Mahmudi (2010:160) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Belanja Thn}_t = \frac{\text{Rea. Belanja Thn}_t - \text{Rea. Belanja Thn}_{t-1}}{\text{Realisasi Belanja Thn}_{t-1}} \times 100\%$$

c. Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja merupakan analisis yang dilakukan untuk menilai keseimbangan antara semua belanja yang ada terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilitas. Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja.

Analisis ini antara lain:

1) Analisis Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja

Analisis proporsi belanja tidak langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah, yaitu untuk pengendalian biaya dan pengendalian anggaran. Belanja tidak langsung merupakan analisis yang membandingkan belanja tiap-tiap fungsi belanja tidak langsung terhadap total belanja dalam APBD. Rasio belanja tidak langsung menurut Mahmudi (2010:162) merumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

2) Analisis Belanja Langsung

Analisis belanja langsung menginformasikan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja langsung yang digunakan oleh instansi pemerintah. Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan kegiatan (aktivitas). Rasio belanja langsung menurut Mahmudi (2010:165) merumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Langsung} = \frac{\text{Rasio Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

d. Rasio Efektivitas Belanja

Efektivitas dalam pemerintah daerah dapat diartikan penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya dan didalam batas

anggaran yang tersedia, dapat pula mencapai tujuan dan sasaran seperti apa yang telah direncanakan. Semakin besar kontribusi pengeluaran yang dilakukan terhadap nilai pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan dapat dikatakan efektif proses kerja dari unit kerja dimaksud. Rasio efektivitas menurut Mardiasmo (2009:54) merumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

e. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi merupakan perbandingan antara realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Rumus pengukuran kinerjanya menurut Mardiasmo (2009:66) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

6. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan memiliki beberapa tujuan, yaitu:

a. Akuntabilitas

Mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Pertanggung jawaban tersebut disampaikan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik.

b. Manajerial

Menyediakan informasi keuangan untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta mempermudah pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang dan ekuitas dana.

c. Transparansi

Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut SFAC No. 4 (*Statement of Financial Accounting Concepts*) Muindro (2013:21) bagi organisasi pemerintah tujuan laporan keuangan adalah:

- 1) Laporan keuangan organisasi pemerintah hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi.
- 2) Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi pemerintah serta kemampuannya untuk melanjutkan memberi pelayanan tersebut.

- 3) Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya.
- 4) Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi pemerintah selama satu periode, serta informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan secara bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk menilai kinerja.
- 5) Memberikan penjelasan untuk membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan.

7. Manfaat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Banyak pihak yang masih berpandangan bahwa penyajian laporan keuangan merupakan formalitas dalam rangka memenuhi ketentuan perundangan saja. Laporan keuangan yang disajikan belum benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kurang dimanfaatkannya laporan keuangan itu karena masih rendahnya budaya akuntabilitas dan budaya membuat laporan keuangan. Penyebab lainnya adalah masih adanya masyarakat yang kurang rasional atau cenderung emosional dalam membuat keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Secara spesifik, menurut Mahmudi (Evelina 2018:38) manfaat penyajian laporan keuangan adalah:

- a. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi kesehatan keuangan pemerintah.

- b. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu pemerintahan dan perubahan-perubahan yang telah dan akan terjadi.
- c. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyariatkan.
- d. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran.
- e. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

B. Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris sangat diperlukan guna sebagai tambahan referensi dan sebagai salah satu bahan pemikiran bagi peneliti dalam penelitian ini. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang sudah membahas tentang kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Juliani Dora (2017)	"Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014"	Kualitatif	Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan pemerintah Kota Yogyakarta baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata derajat desentralisasi rendah.
2	Evelina Lasrianti Aruan	"Analisis Kinerja Keuangan Badan Perencanaan dan	Kualitatif	Hasil analisis menunjukkan bahwa dari

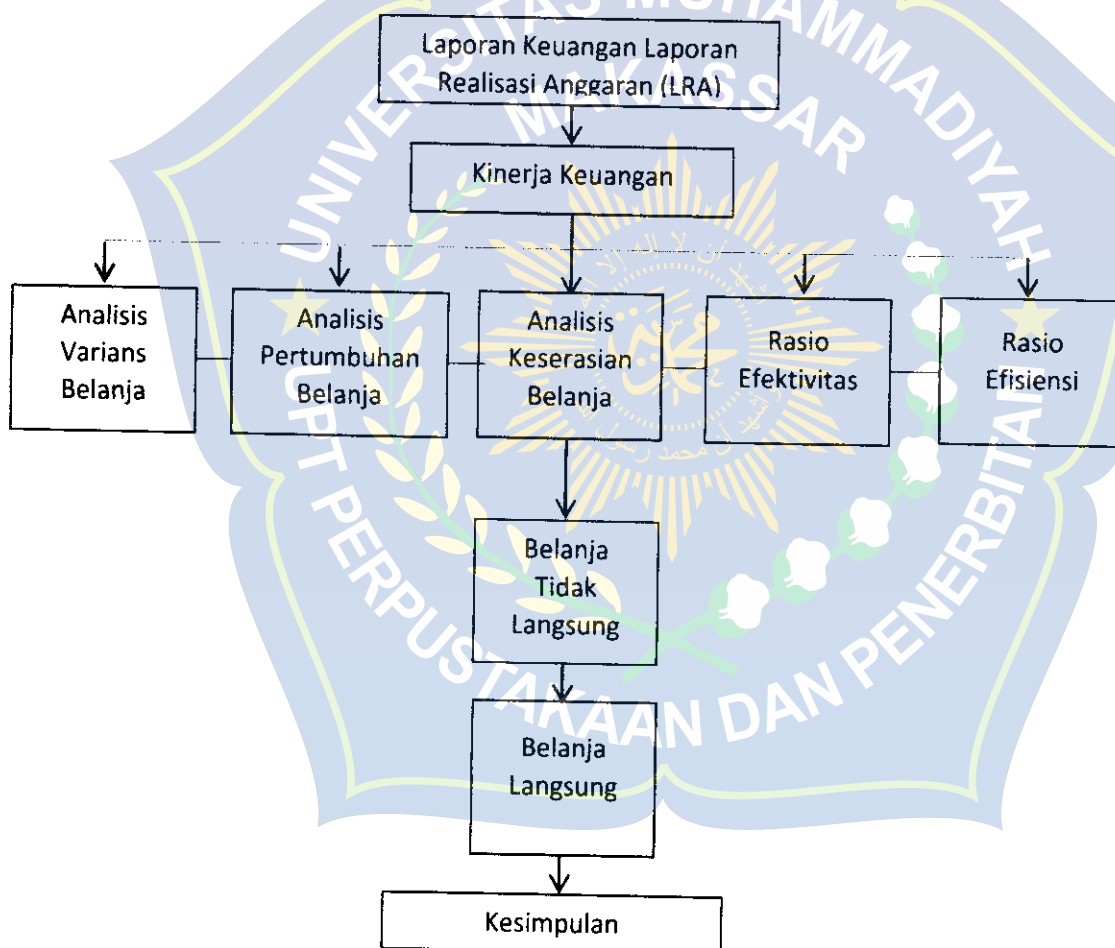
	(2018)	Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara”		tahun 2012-2016 dilihat dari analisis keserasian belanja menunjukkan kinerja keuangan yang tidak baik, analisis pertumbuhan belanja dikatakan baik, analisis varians belanja dapat dikatakan baik, rasio efektivitasnya penggunaan anggaran selama lima tahun dapat dikatakan cukup efektif, rasio efisiensinya dikatakan cukup efisien.
3	Mochammad Faisal Hakim (2018)	“Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2010-2016	Kualitatif	Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan pendapatan daerah kabupaten sleman secara umum dikatakan baik. Kinerja keuangan belanja daerah pemerintah kabupaten Sleman secara umum dapat dikatakan baik.
4	Elyang (2019)	“Analisis Perencanaan dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Kantor	Kualitatif	Hasil analisis menunjukkan bahwa badan pengelola keuangan

		Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Prov. Sul-Sel Tahun 2016-2017”		daerah berhasil menyusun dan merencanakan anggarannya dengan baik sampai tahap terealisasi, namun realisasi anggaran tersebut telah berjalan cukup efektif akan tetapi kurang efisien di tahun 2016 sampai dengan 2017 , yang dikarenakan pengeluarannya lebih besar daripada pendapatannya.
5.	Desi Ratna Sari (2020)	“Analisis Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendekatan <i>Value For Money</i> pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan”	Kualitatif	Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan pendekatan Efektivitas, Efisiensi, Ekonomis, dan <i>Outcome</i>

C. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah miniatur dari keseluruhan proses penelitian, berdasarkan teori yang peneliti kaji maka untuk menjawab pertanyaan dari penelitian, selanjutnya digambarkan kerangka konsep berikut ini:

Gambar 1.1 Kerangka Konsep



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yang bersifat analisis deskriptif kualitatif. Analisisnya mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam. Jenis penelitian ini juga berupa metode penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Kasus yang dimaksud bisa berupa individu atau kelompok.

Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data yang dapat memberikan gambaran yang jelas atas objek yang diteliti, untuk kemudian diproses dan dianalisis lalu ditarik kesimpulannya.

Menurut Bogdan dan Taylor (Sujarweni, 2014:19) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Pemerintahan Kota Makassar yang Beralamat Di Jl.Ahmad Yani No.2, Bulo Gading, Kec.Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kode Pos. 90111

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilakukan kurang lebih 2 bulan terhitung mulai Bulan Juni sampai dengan Bulan Agustus 2021.

C. Sumber Data

Data untuk suatu penelitian dapat dikumpulkan dari berbagai sumber. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017-2019. Sumber data yang digunakan berasal dari kantor Bappeda Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan mencari data sekunder dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang ada pada instansi dengan metode dokumentasi.

Metode dokumentasi ini melakukan pengumpulan data dari Bappeda Provinsi Sumatera Utara berupa data umum dan data khusus. Data umum berupa gambaran umum Bappeda Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan Struktur Organisasinya. Sedangkan, data khusus berupa Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017-2019.

Teknik selanjutnya adalah dokumentasi, penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur yang berhubungan dengan judul yang diajukan, sebagai landasan teori sekaligus sebagai bahan pertimbangan untuk membuktikan judul yang diajukan.

E. Metode Analisis

Teknik analisis data dengan metode deskriptif kualitatif adalah metode dengan mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang sudah didapatkan di lapangan dengan melakukan penjelajahan, kemudian dilakukan pengumpulan data sampai mendalam, mulai dari observasi hingga penyusunan laporan, Sugiyono (2002:34). Berdasarkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang didasarkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yakni dengan konsep anggaran khususnya analisis belanja kita dapat membuat analisis anggaran antara lain

1. Analisis Keserasian Belanja

Merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui keseimbangan antara semua belanja yang ada terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi. Agar fungsi anggaran tersebut pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja. Adapun kriterianya sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kriteria Penilaian Kinerja Keserasian Belanja

Kriteria Keserasian Belanja	Ukuran
Belanja Langsung > Belanja Tidak Langsung	Baik
Belanja Langsung < Belanja Tidak Langsung	Tidak Baik

Analisis ini antara lain:

a. Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja

Merupakan analisis yang membandingkan belanja tidak langsung pada tiap-tiap fungsi terhadap total belanja dalam APBD.

Rumus pengukuran kinerjanya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

b. Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja

Perbandingan antara total belanja langsung dengan total belanja yang ada pada realisasi. Menginformasikan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga belanja operasi sifatnya jangka pendek.

Rumus pengukuran kinerjanya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Langsung} = \frac{\text{Rasio Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pertumbuhan realisasi anggaran belanja yang signifikan selama periode penggunaan anggaran dari tahun ke tahun apakah bersifat positif atau negatif dalam penggunaan anggaran yang ada pada instansi untuk membiayai semua kegiatan-kegiatannya.

Rumus pengukuran kinerjanya adalah sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Belanja Thn}_t = \frac{\text{Rea. Belanja Thn}_t - \text{Rea. Belanja Thn}_{t-1}}{\text{Realisasi Belanja Thn}_{t-1}} \times 100\%$$

Berdasarkan pertumbuhan realisasi belanja baik berupa kenaikan atau penurunan belanja selama kurun waktu tertentu maka, kriteria penilaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Kinerja Pertumbuhan Belanja

Kriteria Pertumbuhan Belanja	Ukuran
Naik	Positif
Turun	Negatif

3. Analisis Rasio Efektivitas dan Efisiensi Belanja

Merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah

Rumus Pengukuran Efektivitas:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kriterianya sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kriteria Penilaian Kinerja Efektivitas Belanja

Kriteria Efektivitas Belanja	Persentase (%)
Sangat Efektif	Lebih dari 100%
Efektif	90-100%

Cukup Efektif	80-90%
Kurang Efektif	60-80%
Tidak Efektif	Dibawah 60%

Rumus Pengukuran Efisiensinya:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kriterianya sebagai berikut:

Tabel 3.4 Kriteria Penilaian Kinerja Efisiensi Belanja

Kriteria Efisiensi Belanja	Persentase (%)
Sangat Efisien	<60%
Efisien	60-80%
Cukup Efisien	81-90%
Kurang Efisien	91-100%
Tidak Efisien	>100%

4. Analisis Varians Belanja

Merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran yang berfungsi untuk mengetahui efisiensi penggunaan anggaran belanja yang digunakan selama tahun anggaran.

Rumus pengukuran kinerjanya adalah sebagai berikut:

$$\text{Analisis Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

pembangunan yang meliputi industri, perdagangan, investasi, energi dan sumber daya mineral, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, pariwisata, koperasi dan UKM.

8) Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Umum

Mempunyai tugas menyusun rencana, mengkoordinasikan penyusunan, perencanaan di bidang Sosial Budaya.

9) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Mempunyai tugas menyusun rencana, mengkoordinasikan penyusunan, perencanaan di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

B. HASIL PENELITIAN

1. Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui keseimbangan antara semua belanja yang ada terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi. Agar fungsi anggaran tersebut pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja. Adapun kriterianya sebagai berikut:

Tabel 4.1 Kriteria Penilaian Kinerja Keserasian Belanja

Kriteria Keserasian Belanja	Ukuran
Belanja Langsung > Belanja Tidak Langsung	Baik
Belanja Langsung < Belanja Tidak Langsung	Tidak Baik

Tabel 4.2
Rekapitulasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Makassar

Tahun	Anggaran	Realisasi	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung
2017	3,685,763,117,000	3,312,532,290,887	2,679,955,886,282	632,376,404,605
2018	4,086,495,359,000	3,522,986,464,879	2,776,033,750,162	746,952,714,735
2019	4,176,183,531,400	3,548,006,636,749	2,663,769,704,066	884,236,932,682

Tabel 4.3
Selisih Realisasi Anggaran

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih
2017	3,685,763,117,000	3,312,532,290,887	373.230.826.113
2018	4,086,495,359,000	3,522,986,464,879	563.508.894.121
2019	4,176,183,531,400	3,548,006,636,749	628.176.894.651

a. Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja

Merupakan analisis yang membandingkan belanja tidak langsung pada tiap-tiap fungsi terhadap total belanja dalam APBD.

Rumus pengukuran kinerjanya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 4.4
Analisis Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja Tahun
Anggaran 2017-2019

Tahun Anggaran	Total Belanja Tidak Langsung	Total Belanja	Rasio (%)
2017	2,679,955,886,282	3,312,532,290,887	80%
2018	2,776,033,750,162	3,522,986,464,879	79%
2019	2,663,769,704,066	3,548,006,636,749	76%
Total	8,119,759,340,510	10,383,525,392,515	78%

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat jika perubahan dan struktur total belanja tidak langsung selalu mengalami perubahan dari tahun 2017-2019. Perubahan yang ditunjukkan adalah perubahan rasio persentase yang terus mengalami penurunan meskipun dengan selisih yang tidak begitu banyak.

Pada tahun 2017 total belanja mencapai angka persentase sebesar 80% pada table belanja tidak langsung, dengan total belanja tidak langsung sesuai dengan yang tertera pada tabel tersebut adalah sebesar Rp. 2,679,955,886,282.

Pada tahun 2018 total belanja mengalami penurunan yang terdapat pada tabel belanja tidak langsung dengan menunjukkan angka persentase sebesar 79%, ini terbukti mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai angka persentase sebesar 80%, dengan total belanja tidak langsung pada tahun 2018 sebesar Rp. 2,776,033,750,162.

Pada tahun 2019 total belanja yang terdapat pada tabel belanja tidak langsung juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, menunjukkan angka persentase sebesar 76% sementara tahun sebelumnya sebesar 79%. Total belanja tidak langsung pada tahun 2019 sebesar Rp. 2,663,769,704,066.

Berdasarkan tabel dari hasil perhitungan yang sesuai dengan rumus pengukuran kinerja dari rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja pada tiga tahun anggaran selalu mengalami perubahan. Perubahan yang ditunjukkan adalah perubahan yang terus mengalami penurunan rasio persentasenya yaitu pada tahun 2017 sebesar 80%, pada tahun 2018 sebesar 79%, pada tahun 2019 sebesar 76%. Sedangkan total belanja tidak langsung seluruhnya adalah sebesar Rp. 8,119,759,340,510 dengan persentase sebesar 78%

b. Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja

Perbandingan antara total belanja langsung dengan total belanja yang ada pada realisasi. Menginformasikan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga belanja operasi sifatnya jangka pendek.

Rumus pengukuran kinerjanya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Langsung} = \frac{\text{Rasio Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

dan belanja tak terduga. Pada tahun 2017 penggunaan anggaran pada belanja tidak langsung sebesar 80% atau sekitar Rp. 2,679,955,886,282 , sedangkan total persentase untuk belanja langsung adalah sebesar 20% atau sekitar Rp. 632,376,404,605, dari total anggaran belanja dalam APBD. Pada tahun ini keserasiannya dikatakan tidak baik, karena persentase belanja tidak langsung lebih besar dari pada belanja langsung.

Pada tahun 2018 penggunaan anggaran pada alokasi belanja tidak langsung mengalami penurunan menjadi 79% atau sekitar Rp. 2,776,033,750,162. Sedangkan untuk alokasi anggaran belanja langsung mengalami kenaikan yang berada pada persentase sebesar 21% atau sekitar Rp. 746,952,714,735. pada tahun ini penggunaan anggaran terfokus kepada belanja tidak langsung, dan pada tahun ini juga dikatakan tidak baik.

Pada tahun 2019 penggunaan anggaran pada belanja tidak langsung mengalami penurunan, tingkat persentase mencapai angka 76% atau sekitar Rp. 2,663,769,704,066. Sedangkan untuk alokasi anggaran belanja langsung mengalami kenaikan dengan tingkat persentase yang menunjukkan angka sebesar 24% atau sekitar Rp 884,236,932,682. Pada tahun ini keserasian belanjanya juga dapat dikatakan tidak baik.

Penggunaan anggaran dari tahun 2017-2019 terfokus pada alokasi belanja tidak langsung dengan total belanja tidak langsung sebesar Rp. 8,119,759,340,510 atau dengan rasio persentase yang menunjukkan angka sebesar 78%. Sedangkan total belanja langsung

lebih kecil dari total belanja tidak langsung sebesar 2,263,566,052,022 atau dengan rasio persentase sebesar 22%. Jika dilihat dari kriteria analisis keserasian belanja antara belanja langsung dan belanja tidak langsung, maka berdasarkan analisis menunjukkan bahwa dari tahun 2017-2019 dapat dikatakan tidak baik karena rasio persentase belanja tidak langsung lebih tinggi dari pada rasio persentase belanja langsung, berarti dalam hal ini penggunaan anggaran di Bappeda Kota Makassar Sulawesi Selatan dapat dikatakan tidak baik selama 2017-2019 karena penggunaan anggaran belanjanya masih terfokus kepada belanja tidak langsung.

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pertumbuhan realisasi anggaran belanja yang signifikan selama periode penggunaan anggaran dari tahun ke tahun apakah bersifat positif atau negatif dalam penggunaan anggaran yang ada pada instansi untuk membiayai semua kegiatan-kegiatannya.

Berdasarkan pertumbuhan realisasi belanja baik berupa kenaikan atau penurunan belanja selama kurun waktu tertentu maka, kriteria penilaian kinerjanya adalah sebagai berikut.

Tabel 4.7

Kriteria Penilaian Kinerja Pertumbuhan Belanja

Kriteria Pertumbuhan Belanja	Ukuran
Naik	Positif
Turun	Negatif

Rumus pengukuran kinerjanya adalah sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Belanja Thn}_t = \frac{\text{Rea. Belanja Thn}_t - \text{Rea. Belanja Thn}_{t-1}}{\text{Realisasi Belanja Thn}_{t-1}} \times 100\%$$

Tabel 4.8
Analisis Pertumbuhan Belanja Tahun Anggaran 2017-2019

Uraian	2017-2018	2018-2019	Total
Rea. Belanja Thn _{t-1}	3,312,532,290,887	3,522,986,464,879	6,835,518,755,766
Rea. Belanja Thn _t	3,522,986,464,879	3,548,006,636,749	7,070,993,101,628
Pertumbuhan	210,454,173,992	25,020,171,870	235,474,345,862
%	6%	1%	3%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan anggaran belanja pada tahun 2017-2018 mengalami kenaikan dan bernilai positif karena pertumbuhan belanja pada tahun ini mengalami penambahan sebesar Rp. 210,454,173,992, dengan persentase sebesar 6%. Selanjutnya pertumbuhan anggaran belanja pada tahun 2018-2019 kembali mengalami kenaikan dan bernilai positif karena pertumbuhan belanja pada tahun ini mengalami penambahan sebesar Rp. 25,020,171,870 dengan persentase sebesar 1%.

Pertumbuhan belanja Bappeda Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2017-2019 dapat dikatakan bernilai positif karena mengalami kenaikan terhadap pertumbuhan belanja, dapat dilihat dari bertambahnya jumlah belanja. jika dilihat dari total keseluruhannya

mengalami pertumbuhan sebesar 3% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 235,474,345,862.

3. Analisis Rasio Efektivitas Belanja

Analisis rasio efektivitas belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah

Kriterianya sebagai berikut:

Tabel 4.9
Kriteria Penilaian Kinerja Efektivitas Belanja

Kriteria Efektivitas Belanja	Persentase (%)
Sangat Efektif	Lebih dari 100%
Efektif	90-100%
Cukup Efektif	80-90%
Kurang Efektif	60-80%
Tidak Efektif	Dibawah 60%

Rumus Pengukuran Efektivitas:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 4.10

Rasio Efektivitas Belanja Tahun Anggaran 2017-2019

Tahun	Anggaran	Realisasi	Rasio Efektivitas
2017	3,685,763,117,000	3,312,532,290,887	90%

2018	4,086,495,359,000	3,522,986,464,879	86%
2019	4,176,183,531,400	3,548,006,636,749	85%
Total	11,948,442,007,400	10,383,525,392,515	87%

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa selama periode tahun anggaran 2017-2019 tingkat efektivitas anggaran yang ada pada instansi Bappeda Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan terus mengalami perubahan. Perubahan yang ditunjukkan adalah perubahan yang terus menurun. Dapat dilihat dari hasil persentase rasio efektivitas yang terus mengalami penurunan.

Pada tahun 2017 tingkat efektivitas dari anggaran belanja berada pada persentase 90% yang menunjukkan angka kisaran realisasi sebesar Rp. 3,312,532,290,887, pada tahun ini anggaran dapat dikatakan efektif.

Pada tahun 2018 mengalami penurunan yang dapat dilihat dari rasio persentase yang menunjukkan angka selisih 4% dengan persentase hanya 86% yang berada pada realisasi anggaran sebesar Rp. 3,522,986,464,879, meskipun mengalami penurunan yang banyak tetapi tidak mengurangi nilai ke efektivitasan pengguna anggaran pada instansi, di tahun ini dapat dikatakan penggunaan anggaran cukup efektif.

Pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang dapat dilihat dari rasio persentasi yang menunjukkan angka selisih 1% dengan persentase hanya 85% yang berada pada realisasi anggaran sebesar Rp. 3,548,006,636,749. Pada tahun ini penggunaan anggaran dari tahun sebelumnya memiliki kesamaan yaitu dapat dikatakan cukup efektif.

Rasio efektivitas belanja yang ditunjukkan berdasarkan perhitungan dan kriteria yang ditetapkan mengalami penurunan dari tahun 2017-2019. Total penggunaan anggaran dikategorikan efektif dan cukup efektif dengan rasio persentase sebesar 87%. Artinya adalah realisasi anggaran yang ditetapkan sudah terpenuhi dari target yang ditetapkan, dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di instansi sudah maksimal dalam hal pelaksanaannya.

4. Analisis Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi merupakan perbandingan antara realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Rumus pengukuran kinerjanya menurut Mardiasmo (2009:66) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kriterianya sebagai berikut:

Tabel 4.11

Kriteria Penilaian Kinerja Efisiensi Belanja

Kriteria Efisiensi Belanja	Persentase (%)
Sangat Efisien	<60%
Efisien	60-80%
Cukup Efisien	81-90%
Kurang Efisien	91-100%

Tidak Efisien	>100%
---------------	-------

Tabel 4.12

Rasio Efisiensi Belanja Tahun Anggaran 2017-2019

Tahun	Anggaran	Belanja Langsung	Rasio Efisiensi
2017	3,685,763,117,000	632,376,404,605	17%
2018	4,086,495,359,000	746,952,714,735	18%
2019	4,176,183,531,400	884,236,932,682	21%
Total	11,948,442,007,400	2,263,566,052,022	19%

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2017 tingkat efisiensi realisasi anggaran berada pada persentase 17% dengan pengguna anggaran belanja langsung sebesar Rp. 632,376,404,605, dari total anggaran sebesar Rp. 3,685,763,117,000, maka dapat dikatakan jika penggunaan anggaran pada tahun 2017 sangat efisien.

Pada tahun 2018 tingkat efisiensi realisasi anggaran berada pada persentase 18% dengan realisasi anggaran belanja langsung menunjukkan angka sebesar sekitar Rp. 746,952,714,735, dari total anggaran sebesar Rp. 4,086,495,359,000. Pada tahun ini terjadi kenaikan anggaran realisasi belanja sebanyak 1% hal ini menunjukkan bahwa tahun sebelumnya masih lebih baik dari tahun ini dalam hal penghematan anggaran. Meskipun demikian pada tahun ini dalam hal pengguna

anggaran masih termasuk dalam kriteria efisiensi belanja yang sangat efisien.

Pada tahun 2019 tingkat efisiensi realisasi anggaran berada pada rasio persentase yang menunjukkan angka sebesar 21% dengan realisasi anggaran belanja langsung menunjukkan angka sebesar Rp. 884,236,932,682, dari total anggaran sebesar Rp. 4,176,183,531,400. Pada tahun ini kembali terjadi kenaikan anggaran realisasi belanja yang menunjukkan kenaikan sebesar 3%, hal ini menunjukkan bahwa tahun sebelumnya masih lebih baik dari tahun ini dalam hal penghematan anggaran. Meskipun demikian pada tahun ini dalam hal pengguna anggaran masih termasuk dalam kriteria efisiensi belanja yang sangat efisien.

Berdasarkan tabel perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa Realisasi Anggaran Belanja Bappeda Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja. Pada tahun 2017-2019 semua angka pada rasio efisiensi menunjukkan angka di bawah 100% bahkan tidak ada yang melebihi dari angka 60% yang menunjukkan kriteria efisiensi belanja yang sangat efisien, sehingga dapat diartikan bahwa tidak ada pemborosan dalam penganggaran belanja pada tahun 2017-2019 tersebut. Dengan demikian Bappeda Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan telah berhasil memenuhi tingkat efisiensi anggaran belanja melalui program-program yang ada dan telah dijalankan.

5. Analisis Varians Belanja

Merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran yang berfungsi untuk mengetahui efisiensi penggunaan anggaran belanja yang digunakan selama tahun anggaran.

Kriterianya sebagai berikut:

Tabel 4.13
Kriteria Penilaian Kinerja Varians Belanja

Kriteria Varians Belanja	Ukuran
Baik	Realisasi Belanja < Anggaran Belanja
Kurang Baik	Realisasi Belanja > Anggaran Belanja

Rumus pengukuran kinerjanya adalah sebagai berikut:

$$\text{Analisis Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

Tabel 4.14
Analisis Varians Belanja Tahun Anggaran 2017-2019

Tahun	Anggaran	Realisasi	Varians Belanja	Perbandingan (%)
2017	3,685,763,117,000	3,312,532,290,887	373,230,862,113	90%
2018	4,086,495,359,000	3,522,986,464,879	563,508,894,121	86%
2019	4,176,183,531,400	3,548,006,636,749	628,176,894,651	85%
Total	11,948,442,007,400	10,383,525,392,515	1,564,916,614,885	87%

Pada Tahun 2017 penyerapan realisasi anggaran yang terdapat pada tabel varians belanja diatas adalah sekitar Rp. 373,230,862,113, atau sekitar 90% yang menunjukkan bahwa tidak semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh instansi terserap sepenuhnya pada pembiayaan yang berjalan selama satu periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam hal ini menyisakan perbandingan persentase sekitar 9% dari penyerapan anggaran yang ada dalam realisasi anggaran belanja pada instansi.

Pada tahun 2018 penyerapan realisasi anggaran pada tabel varians belanja tersebut adalah sekitar Rp. 563,508,894,121, atau sekitar 86%, tingkat persentase pada tahun ini menurun dari tahun sebelumnya, tetapi tidak diikuti dengan penurunan tingkat nominalnya. Terdapat selisih perbandingan persentasenya sebesar 14%. Meskipun secara persentasenya kecil, tetapi jika secara nominalnya cukup signifikan, maka dapat dikatakan kinerjanya baik.

Pada tahun 2019 penyerapan realisasi anggaran pada tabel varians belanja tersebut adalah sekitar Rp. 628,176,894,651, atau sekitar 85%, tingkat persentase pada tahun ini menurun dari tahun sebelumnya, tetapi tidak diikuti dengan penurunan tingkat nominalnya. Terdapat selisih perbandingan persentasenya sebesar 15%. Meskipun secara persentasenya kecil, tetapi jika secara nominalnya cukup signifikan, maka dapat dikatakan kinerjanya baik.

Jika di lihat dari semua perubahan dari tahun ke tahun dapat dikatakan penyerapan penggunaan anggaran sudah cukup efisiensi. Hal ini ditunjukkan dengan angka rata-rata persentase varians belanja

mencapai 87%, dan jika dilihat dari kriterianya maka varians belanja pada Bappeda Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2017-2019 dapat dikatakan baik, karena realisasi belanja tidak melebihi dari anggaran belanja. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 90% sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 85%.

C. PEMBAHASAN

Tabel 4.15
Ringkasan Analisis Kinerja Keuangan Bappeda
Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan

No	Analisis Kinerja Keuangan	Hasil Penelitian
1	Analisis Keserasian Belanja:	
	a. Belanja Tidak Langsung	78%
	b. Belanja Langsung	22%
2	Analisis Pertumbuhan Belanja	3%
3	Analisis Efektivitas Belanja	87%
4	Analisis Efisiensi Belanja	19%
5	Analisis Varians Belanja	87%

1. Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui keseimbangan antara semua belanja yang ada terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi. Agar fungsi anggaran tersebut pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja.

Analisis Keserasian Belanja menunjukkan bahwa jika belanja tidak langsung lebih besar dari belanja langsung dianggap baik. Dan jika belanja pegawai lebih besar dari 50% dalam total belanja, maka dapat

dikatakan juga anggaran belanja baik. Analisis keserasian belanja daerah, secara umum terlihat bahwa sebagian besar dana belanja dialokasikan untuk belanja tidak langsung. Selama tahun 2017-2019 rata-rata belanja tidak langsung sebesar 78%, sedangkan untuk belanja langsung sebesar 22%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Bappeda Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dilihat dari analisis keserasian belanjanya lebih banyak mengeluarkan anggarannya untuk biaya belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung merupakan pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung.

Analisis keserasian belanja pada Bappeda Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan jika dilihat selama 2017-2019, mengalami dampak baik, hal ini dikarenakan penggunaan anggaran lebih terfokus kepada belanja tidak langsung.

Dampaknya jika belanja tidak langsung lebih besar dari pada belanja langsung maka akan berdampak terhadap pembangunan daerah yang berakibat berkurangnya dana yang bersentuhan dengan masyarakat ataupun terhadap program kegiatan instansi. Dan adanya kegiatan yang belum dapat dibiayai disebabkan oleh keterbatasan keuangan daerah. Dan kebutuhan peningkatan ketersediaan infrastruktur yang memerlukan pembiayaan yang relatif besar. Seperti, pembangunan jembatan, pembangunan jalan, pembangunan masjid, dll. Kenaikan belanja tidak langsung memberikan dampak negatif terhadap pembangunan daerah karena lebih memfokuskan kepada penganggaran belanja pegawai untuk

kebutuhan kenaikan gaji, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai.

Solusi dalam mengatasi dampak tersebut adalah perlunya dilakukan penghematan terhadap dana yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung guna dialokasikannya untuk keperluan belanja langsung. Serta menyusun anggaran belanja dengan memperhatikan faktor efisiensi dan efektivitas terhadap pencapaian sasaran maupun targetnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja yang jelas.

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pertumbuhan realisasi anggaran belanja yang signifikan selama periode penggunaan anggaran dari tahun ke tahun apakah bersifat positif atau negatif dalam penggunaan anggaran yang ada pada instansi untuk membiayai semua kegiatan-kegiatannya.

Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan anggaran belanja pada tahun 2017-2018 mengalami kenaikan dan bernilai positif karena pertumbuhan belanja pada tahun ini mengalami penambahan sebesar Rp. 210,454,173,992, dengan persentase sebesar 6%. Selanjutnya pertumbuhan anggaran belanja pada tahun 2018-2019 kembali mengalami kenaikan dan bernilai positif karena pertumbuhan belanja pada tahun ini mengalami penambahan sebesar Rp. 25,020,171,870 dengan persentase sebesar 1%.

Pertumbuhan belanja Bappeda Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2017-2019 dapat dikatakan bernilai positif karena

mengalami kenaikan terhadap pertumbuhan belanja, dapat dilihat dari bertambahnya jumlah belanja. jika dilihat dari total keseluruhannya mengalami pertumbuhan sebesar 3% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 235,474,345,862.

3. Analisis Efektivitas Belanja

Analisis efektivitas belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.

Selama periode tahun anggaran 2017-2019 tingkat efektivitas anggaran yang ada pada instansi Bappeda Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan terus mengalami perubahan dengan total rata-rata mencapai angka 87%. Perubahan yang ditunjukkan adalah perubahan yang terus menurun. Dapat dilihat dari hasil persentase rasio efektivitas yang terus mengalami penurunan. Rata-rata perhitungannya berada pada kisaran 80-100%. Jika dilihat dari tingkat kriterianya maka pengguna anggaran selama lima tahun anggaran tersebut sudah cukup efektif. Tingkat rasio tertinggi pada tahun 2017 sebesar 90% dan rasio terendah pada tahun 2019 sebesar 85%. Hal ini masih diatas 80%.

4. Analisis Efisiensi Belanja

Analisis efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.

Berdasarkan tabel perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa Realisasi Anggaran Belanja Bappeda Kota Makassar Provinsi Sulawesi

Selatan tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja. Pada tahun 2017-2019 semua angka pada rasio efisiensi menunjukkan angka di bawah 100% bahkan tidak ada yang melebihi dari angka 60% yang menunjukkan kriteria efisiensi belanja yang sangat efisien, sehingga dapat diartikan bahwa tidak ada pemborosan dalam penganggaran belanja pada tahun 2017-2019 tersebut. Dengan demikian Bappeda Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan telah berhasil memenuhi tingkat efisiensi anggaran belanja melalui program-program yang ada dan telah dijalankan.

5. Analisis Varians Belanja

Analisis varians belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran yang berfungsi untuk mengetahui efisiensi penggunaan anggaran belanja yang digunakan selama tahun anggaran.

Jika di lihat dari semua perubahan dari tahun ke tahun dapat dikatakan penyerapan penggunaan anggaran sudah cukup efisiensi. Hal ini ditunjukkan dengan angka rata-rata persentase varians belanja mencapai 87%, dan jika dilihat dari kriterianya maka varians belanja pada Bappeda Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2017-2019 dapat dikatakan baik, karena realisasi belanja tidak melebihi dari anggaran belanja. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 90% sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 85%.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Evelina Lasrianti Aruan pada tahun 2018 dengan judul Analisis Kinerja Keuangan

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan rumus: analisis keserasian belanja yang terbagi kepada belanja langsung dan belanja tidak langsung, analisis efektivitas, analisis varians belanja, analisis efisiensi dan analisis pertumbuhan belanja. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2012-2016 dilihat dari analisis keserasian belanja menunjukkan kinerja keuangan yang tidak baik, karena total keseluruhan belanja tidak langsung sebesar 51% dan untuk belanja langsung sebesar 49%, sehingga dapat dikatakan Bappeda Provinsi Sumatera Utara kurang memperhatikan pembangunan daerah.

Dari analisis pertumbuhan belanja pada tahun 2012-2016 dikatakan baik, karena terlihat adanya pertumbuhan belanja selama lima tahun dengan total keseluruhannya sebesar 1%, dengan nilai maksimal 14% pada tahun 2014 dan nilai minimal 3% pada tahun 2015. Dari analisis varians belanja dari tahun 2012-2016 dapat dikatakan baik, dengan total perbandingan keseluruhannya adalah sebesar 89%. Namun dilihat dari rasio efektivitasnya penggunaan anggaran selama lima tahun dapat dikatakan cukup efektif dengan total keseluruhan rasionya mencapai 83%. Sedangkan jika dilihat dari rasio efisiensinya Bappeda Provinsi Sumatera Utara dikatakan cukup efisien dalam penggunaan anggarannya dari tahun 2012-2016, dengan total keseluruhan sebesar 34%, maka dalam hal ini Bappeda Provinsi Sumatera Utara telah mampu melakukan penghematan anggaran.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Elyang pada tahun 2019 dengan judul penelitian Analisis Perencanaan dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah

(BPKD) Prov. Sul-Sel Tahun 2016-2017. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang diolah adalah ringkasan Rencana Kerja Anggaran dan Realisasi Anggaran pada badan pengelola keuangan daerah (BPKD) tahun 2016 sampai 2017 yang didapatkan dari laporan tahunan badan pengelola keuangan daerah. Teknik perhitungan yang digunakan dalam penelitian adalah menghitung rasio efektifitas dan rasio efisiensi realisasi anggaran badan pengelola keuangan daerah. Sedangkan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menghitung efektifitas dan efisiensi realisasi anggaran badan pengelola keuangan daerah melalui hasil keseluruhan anggaran pendapatan dan belanja. Berdasarkan hasil perhitungan dan pengumpulan data perencanaan anggaran badan pengelola keuangan daerah berhasil menyusun dan merencanakan anggarannya dengan baik sampai tahap terealisasi, namun realisasi anggaran tersebut telah berjalan cukup efektif akan tetapi kurang efisien di tahun 2016 sampai dengan 2017, yang dikarenakan pengeluarannya lebih besar daripada pendapatannya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang didasarkan pada analisis data, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis keserasian belanja pada Bappeda Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan jika dilihat selama 2017-2019, mengalami dampak yang baik, hal ini dikarenakan penggunaan anggaran lebih terfokus kepada belanja tidak langsung.
2. Pertumbuhan belanja Bappeda Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2017-2019 dapat dikatakan bernilai positif karena mengalami kenaikan terhadap pertumbuhan belanja, dapat dilihat dari bertambahnya jumlah belanja. jika dilihat dari total keseluruhannya mengalami pertumbuhan sebesar 3%.
3. Kinerja keuangan Bappeda kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dilihat dari analisis efektivitas belanjanya selama tahun 2017-2019 sudah cukup efektif. Dapat dilihat dari rata-rata perhitungannya adalah sebesar 87%, hal ini masih diatas 80%.
4. Kinerja keuangan Bappeda Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dilihat dari efisiensi belanjanya tahun 2017-2019 semua angka pada rasio efisiensi menunjukkan angka di bawah 100% bahkan tidak ada yang melebihi dari angka 60% yang menunjukkan kriteria efisiensi belanja yang sangat efisien, sehingga dapat diartikan bahwa tidak ada pemborosan dalam penganggaran belanja.

5. Kinerja keuangan Bappeda Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dilihat dari varians belanjanya tahun 2017-2019 dapat dikatakan baik, karena realisasi belanja tidak melebihi dari anggaran belanja. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 90% sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 85%. Dengan total rata-rata sebesar 87%.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan keterbatasan penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran bagi instansi Bappeda Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan adalah:
 - a. Dari segi perencanaan penganggaran, diharapkan sisi negatif yang dimaksudkan dengan adanya penghematan anggaran untuk biaya pemenuhan pada pembiayaan agar penghematan yang dilakukan dapat memberikan efek yang lebih baik dalam periode tahun berikutnya. Dalam analisis ini penghematan perencanaan anggaran harus dilaksanakan dengan memperhatikan kebijakan antara realisasi dan anggaran, hendaknya juga memperhatikan situasi dan kondisi agar anggaran yang ada dan sudah disusun dapat direalisasikan dengan baik.
 - b. Dari segi pertumbuhan belanja berdasarkan periode tersebut memberikan gambaran bahwa angka persentase yang ditunjukkan dari hasil perhitungan bisa saja dijadikan acuan untuk penyusunan anggaran agar lebih baik lagi di periode tahun anggaran selanjutnya.
 - c. Dari analisis keserasian belanja dapat disarankan, perlu adanya perhatian khusus dari instansi Bappeda Kota Makassar Provinsi

Sulawesi Selatan dalam penggunaan anggaran belanja terhadap belanja langsung. Dimana belanja langsung ini sangat berperan terhadap kegiatan operasional instansi. Dan sebaiknya Bappeda Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dapat mengoptimalkan kinerja instansinya dengan mengalokasikan penggunaan anggaran pada pembiayaan belanja langsung, karena ini sudah menjadi urusan tetap yang harus disegerakan untuk pembiayaan selama periode anggaran.

- d. Penggunaan anggaran belanja daerah yang telah dilakukan berdasarkan alat analisis menunjukkan bahwa penyerapan kinerja anggaran yang ada pada Bappeda Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sudah memenuhi syarat efisiensi dan efektivitas yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil yang maksimum, terutama bagi perencanaan dan pembangunan daerah.
2. Bagi peneliti selanjutnya, periode penelitian ini terbatas untuk tahun 2017-2019. Diharapkan penelitian selanjutnya menambahkan periode tahun penelitian agar lebih akurat dalam menganalisis kinerja keuangan bappeda Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahrn, A. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Klaten Tahun 2008-2012*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. 6(4). 50-61
- Dedi, N. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat.
- Desi R.S, 2020, *Analisis Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendekatan Value For Money pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. 4(2). 1-11
- Evelina, L. 2018. *Analisis Kinerja Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 9(4)
- Elyang, 2019. *Analisis Perencanaan dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Prov. Sul-Sel Tahun 2016-2017*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar
- Gede, E.P, 2005, *Pengukuran Kinerja Keuangan*, 2(6)
- Hony, A. 2013. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kab. Blora Tahun 2007-2011*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. 7(11). 35-47
- Juliani, D. 2017. *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014*. Jurnal Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. 7(2).

Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan

Mahmudi, 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta:

UPP STM YKPN.

Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta:

Andi.

Mangkunegara, A.P. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*.

Cetakan ke tigabelas. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Marja, 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Aktual*, Bandung: Pustaka Rahmat. 2(8)

Mochammad, F.H. 2018. *Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2010-2016*. Jurnal Fakultas Ekonomi. 7(8). 50-62.

Muindro, R. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Pasolog, H, (2007), *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

Sujarweni, V. W. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pres

Sumarjo, H. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*. Jurnal Sarjana. Universitas Sebelas Maret. 5(10). 22-33



LAMPIRAN

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Reff	Anggaran Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	(%)	Realisasi Tahun 2016
1	PENDAPATAN					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.5.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	7.5.1.1.1				
4	Pendapatan Retribusi Daerah	7.5.1.1.1.1	1,059,991,478,000.00	938,796,384,191.06	88.57	752,142,501,992.98
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	7.5.1.1.1.2	101,559,741,000.00	72,788,075,037.55	71.67	128,471,643,140.00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.5.1.1.1.3	45,287,319,000.00	45,023,066,147.08	99.42	15,562,590,481.88
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	7.5.1.1.1.4	278,027,399,000.00	280,623,568,856.40	100.93	75,683,017,990.90
8	PENDAPATAN TRANSFER	7.5.1.1.2				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	7.5.1.1.2.1				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	7.5.1.1.2.1.a	128,623,570,000.00	114,981,453,962.00	89.39	109,645,984,333.00
11	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	7.5.1.1.2.1.b	3,355,989,000.00	3,735,395,178.00	69.74	7,503,124,911.00
12	Dana Alokasi Umum	7.5.1.1.2.1.c	1,300,764,306,000.00	1,300,764,306,000.00	100.00	1,324,023,135,000.00
13	Dana Alokasi Khusus	7.5.1.1.2.1.d	257,056,784,000.00	253,486,011,263.00	98.61	551,575,386,038.00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1,691,808,649,000.00	1,672,967,166,403.00	98.89	1,992,747,630,283.00
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	7.5.1.1.2.2				
16	Dana Ganjoni Khusus		0.00	0.00	0.00	0.00
17	Dana Penyesuaian		7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	100.00	0.00
18	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya		7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	100.00	0.00
19	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	7.5.1.1.2.3				
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		306,765,424,000.00	366,638,439,266.00	119.52	304,485,818,811.30
21	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
22	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi		306,765,424,000.00	366,638,439,266.00	119.52	304,485,818,811.30
23	Total Pendapatan Transfer		2,998,666,073,000.00	2,847,185,685,669.00	102.05	2,297,133,449,093.30
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	7.5.1.1.3				
25	Pendapatan Hibah		15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	100.00	235,845,582,414.00
26	Bantuan Keuangan		11,520,000,000.00	17,018,518,800.00	147.73	41,711,370,332.00
27	Pendapatan Dana Darurat		0.00	0.00	0.00	0.00
28	Pendapatan Lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
29	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		26,520,000,000.00	32,018,518,800.00	120.73	277,556,952,746.00
30	JUMLAH PENDAPATAN		3,517,452,810,000.00	3,416,355,218,701.10	97.13	3,546,650,155,448.06
31	BELANJA	7.5.1.2				
32	BELANJA OPERASI	7.5.1.2.1				
33	Belanja Pegawai	7.5.1.2.1.1	1,254,090,169,639.00	1,193,157,695,155.00	95.14	1,450,479,947,166.00
34	Belanja Barang	7.5.1.2.1.2	1,553,800,562,305.00	1,409,619,453,503.66	90.72	1,115,184,992,271.00
35	Belanja Bunga	7.5.1.2.1.3	800,000,000.00	254,324,108.38	31.79	583,283,988.69
36	Belanja Subsidi	7.5.1.2.1.4	0.00	0.00	0.00	0.00
37	Belanja Hibah	7.5.1.2.1.5	86,666,067,750.00	76,924,413,515.00	88.76	76,328,270,950.00
38	Belanja Bantuan Sosial	7.5.1.2.1.6	0.00	0.00	0.00	47,161,000.00
39	Jumlah Belanja Operasi		2,895,356,799,694.00	2,679,955,886,282.04	92.56	2,642,623,655,375.69
40	BELANJA MODAL	7.5.1.2.2				
41	Belanja Tanah	7.5.1.2.2.1	22,758,042,600.00	3,861,152,420.00	16.97	41,595,473,792.00
42	Belanja Peralatan dan Mesin	7.5.1.2.2.2	200,762,855,619.00	182,790,683,855.40	91.05	196,604,104,825.00

43	Belanja Gedung dan Bangunan	7.5.1.2.2.3	156,524,447,912.00	113,572,141,933.00	72.56	106,493,266,617.00
44	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.1.2.2.4	359,594,235,575.00	286,102,528,031.00	79.56	283,818,503,347.00
45	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.5.1.2.2.5	36,445,547,500.00	35,628,111,498.00	97.76	2,363,346,976.00
46	Belanja Aset Lainnya	7.5.1.2.2.6	4,321,188,100.00	3,065,255,800.00	70.94	3,662,206,000.00
47	Jumlah Belanja Modal		780,406,317,306.00	625,019,873,537.40	80.09	634,536,951,557.00
48	BELANJA TAK TERDUGA	7.5.1.2.3				
49	Belanja Tak Terduga		10,000,000,000.00	7,556,531,068.00	75.57	82,616,150.00
50	Jumlah Belanja Tak Terduga		10,000,000,000.00	7,556,531,068.00	75.57	82,616,150.00
51	JUMLAH BELANJA		3,685,763,117,000.00	3,312,532,290,887.44	89.87	3,277,243,223,083.69



No.	Urutan	Reff	Anggaran Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	(%)	Realisasi Tahun 2016
1	2	3	3	4	5	6
52	TRANSFER	7.5.1.3				
53	TRANSFER/BAGI HASIL KE KELURAHAN	7.5.1.3.1				
54	Bagi Hasil Pajak		0.00	0.00	0.00	0.00
55	Bagi Hasil Retribusi		0.00	0.00	0.00	0.00
56	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
57	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE KELURAHAN		0.00	0.00	0.00	0.00
58	TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN	7.5.1.3.2				
59	Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
60	Bantuan Keuangan Lainnya		1,097,743,000.00	1,091,333,000.00	99.42	1,097,743,000.00
61	JUMLAH TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN		1,097,743,000.00	1,091,333,000.00	99.42	1,097,743,000.00
62	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER		3,686,868,868,800.00	3,313,623,623,887.44	89.88	3,278,348,966,882.69
63	SURPLUS/DEFISIT		(169,408,850,000.00)	182,731,594,813.66	60.64	265,389,189,362.37
64	PEMBIAYAAN	7.5.1.3				
65	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.5.1.3.1				
66	Penggunaan SILPA					
67	Pencairan Dana Cadangan		173,408,850,000.00	173,408,850,770.73	100.00	144,731,959,947.36
68	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0.00	0.00	0.00	0.00
69	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0.00	0.00	0.00	0.00
70	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
71	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0.00	0.00	0.00	0.00
72	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0.00	0.00	0.00	0.00
73	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0.00	0.00	0.00	0.00
74	Pinjaman Dalam Negeri - lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
75	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		0.00	0.00	0.00	0.00
76	Penerimaan Pinjaman Daerah		0.00	0.00	0.00	0.00
77	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0.00	3,580,000.00	0.00	3,370,000.00
78	Penerimaan Piutang Daerah		0.00	0.00	0.00	0.00
79	Penerimaan Kewajiban Pihak Ketiga		0.00	0.00	0.00	0.00
79	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		0.00	0.00	0.00	0.00
80	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		173,408,850,000.00	173,412,439,770.73	100.00	144,735,329,947.36
81	Pembentukan Dana Cadangan					
82	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.5.1.3.2				
83	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0.00	0.00	0.00	0.00
84	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0.00	0.00	0.00	235,845,582,414.00
85	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		4,000,000,000.00	3,790,086,165.04	94.75	3,790,086,165.00
86	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0.00	0.00	0.00	0.00
87	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0.00	0.00	0.00	0.00
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
89	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0.00	0.00	0.00	0.00
90	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0.00	0.00	0.00	0.00
91	Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
92	Jumlah Pengeluaran		0.00	0.00	0.00	0.00
93			0.00	0.00	0.00	0.00
93			4,000,000,000.00	3,790,086,165.04	94.75	239,635,668,579.00
94	PEMBIAYAAN NETO		169,408,850,000.00	169,622,344,605.69	100.13	(94,908,338,591.64)
95	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	7.5.1.3.3	0.00	272,353,939,419.35	0.00	173,408,850,770.73

2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31
DESEMBER 2018 DAN 2017

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Ref	Anggaran Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	(%)	Realisasi Tahun 2017
1	2	3	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	7.5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	7.5.1.1.1.1	1,155,991,478,000.00	942,551,891,961.00	81.54	938,796,384,191.06
4	Pendapatan Retribusi Daerah	7.5.1.1.1.2	136,430,940,000.00	57,277,225,805.00	41.98	72,788,075,037.56
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	7.5.1.1.1.3	50,002,154,000.00	49,463,120,625.29	98.92	45,023,066,147.08
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.5.1.1.1.4	160,986,647,000.00	136,160,772,598.36	84.58	280,623,568,836.40
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		1,503,411,219,000.00	1,185,453,010,989.65	78.85	1,337,231,094,232.10
8	PENDAPATAN TRANSFER	7.5.1.1.2				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	7.5.1.1.2.1				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	7.5.1.1.2.1.a	141,739,833,000.00	102,913,565,623.00	72.60	114,981,453,962.00
11	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	7.5.1.1.2.1.b	4,755,663,000.00	4,366,784,880.00	91.82	3,735,395,178.00
12	Dana Alokasi Umum	7.5.1.1.2.1.c	1,300,764,306,000.00	1,299,554,321,692.00	99.91	1,300,764,306,000.00
13	Dana Alokasi Khusus	7.5.1.1.2.1.d	430,810,337,000.00	401,425,917,297.00	93.18	253,486,011,263.00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1,878,090,139,000.00	1,800,260,589,494.00	96.28	1,673,967,166,403.00
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	7.5.1.1.2.2				
16	Dana Otonomi Khusus		0.00	0.00	0.00	0.00
17	Dana Pelayanaan		35,750,000,000.00	17,875,000,000.00	50.00	7,500,000,000.00
18	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya		35,750,000,000.00	17,875,000,000.00	50.00	7,500,000,000.00
19	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	7.5.1.1.2.3				
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		324,416,000,000.00	272,000,033,019.00	83.84	366,638,439,266.00
21	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
22	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi		324,416,000,000.00	272,000,033,019.00	83.84	366,638,439,266.00
23	Total Pendapatan Transfer		2,238,256,139,000.00	2,098,135,622,513.00	93.74	2,047,105,605,669.00
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	7.5.1.1.3				
25	Pendapatan Hibah		132,904,600,000.00	128,588,743,987.00	96.75	15,000,000,000.00
26	Bantuan Keuangan		0.00	0.00	0.00	17,018,518,800.00
27	Pendapatan Dana Darurat		0.00	0.00	0.00	0.00
28	Pendapatan Lainnya		17,664,000,000.00	16,302,351,673.00	92.29	0.00
29	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		150,568,600,000.00	144,891,095,660.00	96.23	32,018,518,800.00
30	JUMLAH PENDAPATAN		3,892,235,958,000.00	3,428,479,729,162.65	88.09	3,416,385,218,701.10
31	BELANJA	7.5.1.2				
32	BELANJA OPERASI	7.5.1.2.1				
33	Belanja Pegawai	7.5.1.2.1.1	1,306,340,510,682.00	1,204,192,744,067.00	92.49	1,193,157,695,155.00
34	Belanja Barang	7.5.1.2.1.2	1,674,786,356,767.00	1,430,119,739,515.00	85.39	1,409,619,453,503.66
35	Belanja Bunga	7.5.1.2.1.3	0.00	0.00	0.00	254,324,108.38
36	Belanja Subsidi	7.5.1.2.1.4	0.00	0.00	0.00	0.00
37	Belanja Hibah	7.5.1.2.1.5	148,751,000,000.00	137,256,266,580.00	92.27	76,924,413,515.00
38	Belanja Bantuan Sosial	7.5.1.2.1.6	510,000,000.00	465,000,000.00	91.18	0.00
39	Jumlah Belanja Operasi		3,138,387,867,449.00	2,776,033,759,162.00	88.68	2,679,955,886,212.04
40	BELANJA MODAL	7.5.1.2.2				
41	Belanja Tanah	7.5.1.2.2.1	7,430,045,800.00	1,287,268,520.00	17.33	3,861,152,420.00
42	Belanja Perbaikan dan Mesin	7.5.1.2.2.2	188,952,542,333.00	148,311,772,459.00	78.49	182,790,683,853.40
43	Belanja Gedung dan Bangunan	7.5.1.2.2.3	192,254,053,465.00	148,354,692,939.00	77.17	113,572,141,933.00

44	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.1.2.2.4	524,624,080,580.00	412,524,720,881.00	78.63	286,102,528,031.00
45	Belanja Asst Tetap Lainnya	7.5.1.2.2.5	35,024,524,273.00	32,061,129,098.09	91.54	35,628,111,498.00
46	Belanja Asst Lainnya	7.5.1.2.2.6	4,822,245,100.00	4,292,476,558.00	89.01	3,065,255,800.00
47	Jumlah Belanja Modal		953,107,491,551.00	746,832,060,455.09	78.36	625,819,873,537.40
48	BELANJA TAK TERDUGA	7.5.1.2.3				
49	Belanja Tak Terduga		3,000,000,000.00	120,654,280.00	4.02	7,556,531,068.00
50	Jumlah Belanja Tak Terduga		3,000,000,000.00	120,654,280.00	4.02	7,556,531,068.00
51	JUMLAH BELANJA		4,086,495,359,000.00	3,522,986,464,897.09	86.21	3,312,532,290,687.44



No.	Urutan	Reff	Anggaran Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	(%)	Realisasi Tahun 2017
1	2	3	3	4	5	6
52	TRANSFER	7.5.1.3				
53	TRANSFER/BAGI HASIL KE KELURAHAN	7.5.1.3.1				
54	Bagi Hasil Pajak		0.00	0.00	0.00	0.00
55	Bagi Hasil Retribusi		0.00	0.00	0.00	0.00
56	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
57	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE KELURAHAN		0.00	0.00	0.00	0.00
58	TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN	7.5.1.3.2				
59	Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	100.00	0.00
60	Bantuan Keuangan Lainnya		1,094,538,000.00	1,094,538,000.00	100.00	1,091,333,000.00
61	JUMLAH TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN		3,094,538,000.00	3,094,538,000.00	100.00	1,091,333,000.00
62	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER		4,089,589,897.00	3,526,881,882.89	86.23	3,313,623,623.887.44
63	SURPLUS/DEFISIT		(197,353,939,000.00)	(97,601,273,734.44)	49.45	102,731,594,813.66
64	PEMBIAYAAN	7.5.1.3				
65	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.5.1.3.1				
66	Penggunaan SILPA		272,353,939,000.00	272,353,939,419.35	100.00	173,408,850,770.73
67	Pencairan Dana Cadangan		0.00	0.00	0.00	0.00
68	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0.00	0.00	0.00	0.00
69	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0.00	0.00	0.00	0.00
70	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
71	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0.00	0.00	0.00	0.00
72	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0.00	0.00	0.00	0.00
73	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0.00	0.00	0.00	0.00
74	Pinjaman Dalam Negeri - lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
75	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		0.00	0.00	0.00	0.00
76	Penerimaan Pinjaman Daerah		0.00	0.00	0.00	0.00
77	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0.00	0.00	0.00	3,580,000.00
78	Penerimaan Pinang Daerah		0.00	0.00	0.00	0.00
79	Penerimaan Kewajiban Pihak Ketiga		0.00	4,350,000.00	100.00	0.00
79	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		0.00	0.00	0.00	0.00
80	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		172,353,939,000.00	172,358,289,419.35	100.00	173,412,430,770.73
81	Pembentukan Dana Cadangan					
82	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.5.1.3.2				
83	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0.00	0.00	0.00	0.00
84	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		75,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00
85	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0.00	0.00	0.00	3,790,086,165.00
86	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0.00	0.00	0.00	0.00
87	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0.00	0.00	0.00	0.00
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
89	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0.00	0.00	0.00	0.00
90	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0.00	0.00	0.00	0.00
91	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
92	Jumlah Pengeluaran		0.00	0.00	0.00	0.00
93			75,000,000,000.00	0.00	0.00	3,790,086,165.00
94	PEMBIAYAAN NETO		197,353,939,000.00	172,358,289,419.35	138.00	169,622,344,605.73
95	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	7.5.1.3.3	0.00	174,757,815,584.91	0.00	272,353,939,419.39

3. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(dalam rupiah)

No.	Uratan	Ref	Anggaran Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	(%)	Realisasi Tahun 2018
1	2	3	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	7.5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	7.5.1.1.1.1	1.315.000.000.000.00	1.067.323.035.833.80	81.17	942.551.891.961.00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	7.5.1.1.1.2	132.348.780.000.00	68.097.361.544.56	51.45	57.277.225.805.00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipiukkan	7.5.1.1.1.3	37.809.786.683.00	18.235.557.959.00	48.20	49.463.120.625.29
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.5.1.1.1.4	139.617.668.903.00	149.670.382.216.58	107.20	136.160.772.598.36
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		1.624.776.235.586.00	1.303.316.337.553.94	80.22	1.185.453.010.989.65
8	PENDAPATAN TRANSFER	7.5.1.1.2				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	7.5.1.1.2.1				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	7.5.1.1.2.1.a	104.237.373.000.00	73.049.789.863.00	70.08	102.913.563.625.00
11	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	7.5.1.1.2.1.b	7.335.891.000.00	4.623.235.530.00	63.02	4.366.784.880.00
12	Dana Alokasi Umum	7.5.1.1.2.1.c	1.406.148.187.000.00	1.379.148.200.000.00	98.08	1.299.554.321.692.00
13	Dana Alokasi Khusus	7.5.1.1.2.1.d	387.588.474.464.00	367.746.570.055.00	94.88	401.425.917.297.00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.905.309.925.464.00	1.824.567.795.448.00	95.76	1.808.268.589.494.00
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	7.5.1.1.2.2				
16	Dana Otonomi Khusus		0.00	0.00	0.00	0.00
17	Dana Penyusunan		31.415.999.000.00	31.415.999.000.00	100.00	17.875.000.000.00
18	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya		31.415.999.000.00	31.415.999.000.00	100.00	17.875.000.000.00
19	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	7.5.1.1.2.3				
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		337.584.703.666.00	356.994.230.000.97	105.75	272.000.033.019.00
21	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
22	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi		337.584.703.666.00	356.994.230.000.97	105.75	272.000.033.019.00
23	Total Pendapatan Transfer		2.274.310.628.130.00	2.212.978.024.448.97	97.30	2.090.135.623.513.00
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	7.5.1.1.3				
25	Pendapatan Hibah		138.825.600.000.00	132.401.628.152.00	95.37	128.588.743.987.00
26	Bantuan Keuangan		0.00	0.00	0.00	0.00
27	Pendapatan Dana Darurat		0.00	0.00	0.00	0.00
28	Pendapatan Lainnya		17.664.000.000.00	17.664.000.000.00	100.00	16.302.351.673.00
29	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		156.489.600.000.00	150.065.628.152.00	95.89	144.891.095.660.00
30	JUMLAH PENDAPATAN		4.855.576.463.716.00	3.666.359.990.154.91	90.40	3.428.479.729.162.65
31	BELANJA	7.5.1.2				
32	BELANJA OPERASI	7.5.1.2.1				
33	Belanja Pegawai	7.5.1.2.1.1	1.325.927.751.532.00	1.212.306.922.225.00	91.43	1.208.192.744.067.00
34	Belanja Barang	7.5.1.2.1.2	1.632.090.986.253.00	1.393.040.321.841.50	85.35	1.430.119.739.515.00
35	Belanja Bunga	7.5.1.2.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00
36	Belanja Subsidi	7.5.1.2.1.4	0.00	0.00	0.00	0.00
37	Belanja Hibah	7.5.1.2.1.5	63.671.973.545.00	55.552.460.000.00	87.25	137.256.266.580.00
38	Belanja Bantuan Sosial	7.5.1.2.1.6	3.115.000.000.00	2.870.000.000.00	92.13	465.000.000.00
39	Jumlah Belanja Operasi		3.024.895.711.330.00	2.663.769.784.866.50	88.06	2.776.833.758.162.00
40	BELANJA MODAL	7.5.1.2.2				
41	Belanja Tanah	7.5.1.2.2.1	2.455.170.500.00	1.234.902.530.00	50.30	1.287.268.520.00
42	Belanja Peralatan dan Mesin	7.5.1.2.2.2	331.373.809.733.00	268.978.239.337.00	81.17	148.311.772.459.00
43	Belanja Gedung dan Bangunan	7.5.1.2.2.3	242.554.103.887.00	171.879.634.304.00	70.86	148.354.092.939.00
44	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.1.2.2.4	513.734.790.371.00	416.511.780.032.80	81.08	412.524.720.881.00
45	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.5.1.2.2.5	27.876.635.874.00	24.613.620.479.00	88.29	32.061.129.098.00

46	Belanja Aset Lainnya	7.5.1.2.2.6	1,505,500,799.00	984,608,000.00	65.40	4,292,476,558.00
47	Jumlah Belanja Modal		1,119,509,811,164.00	884,282,784,682.80	78.98	746,832,860,455.09
48	BELANJA TAK TERDUGA	7.5.1.2.3				
49	Belanja Tak Terduga		31,877,808,906.91	34,148,000.00	0.11	120,654,280.00
50	Jumlah Belanja Tak Terduga		31,877,808,906.91	34,148,000.00	0.11	120,654,280.00
51	JUMLAH BELANJA		4,176,183,531,409.91	3,548,806,636,749.30	84.96	3,522,986,464,897.09



No.	Urutan	Reff	Anggaran Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	(%)	Realisasi Tahun 2019
1	2	3	3	4	5	6
52	TRANSFER	7.5.1.3				
53	TRANSFER/BAGI HASIL KE KELURAHAN	7.5.1.3.1				
54	Bagi Hasil Pajak		0.00	0.00	0.00	0.00
55	Bagi Hasil Retribusi		0.00	0.00	0.00	0.00
56	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
57	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE KELURAHAN		0.00	0.00	0.00	0.00
58	TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN	7.5.1.3.2				
59	Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya		0.00	0.00	0.00	2,000,000,000.00
60	Bantuan Keuangan Lainnya		1,149,948,000.00	1,116,584,000.00	97.10	1,094,538,000.00
61	JUMLAH TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN		1,149,948,000.00	1,116,584,000.00	97.10	3,094,538,000.00
62	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER		4,177,333,479,400.91	3,549,123,220,749.30	84.96	3,524,061,002,897.09
63	SURPLUS/DEFISIT		(121,757,015,684.91)	117,236,769,405.61	(96.29)	(97,601,273,734.44)
64	PEMBIAYAAN	7.5.1.3				
65	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.5.1.3.1				
66	Penggunaan SILPA		174,757,015,684.91	174,757,015,684.91	100.00	272,353,939,419.35
67	Pencairan Dana Cadangan		0.00	0.00	0.00	0.00
68	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0.00	0.00	0.00	0.00
69	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0.00	0.00	0.00	0.00
70	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
71	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0.00	0.00	0.00	0.00
72	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0.00	0.00	0.00	0.00
73	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0.00	0.00	0.00	0.00
74	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
75	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		0.00	0.00	0.00	0.00
76	Penerimaan Pinjaman Daerah		0.00	0.00	0.00	0.00
77	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
78	Penerimaan Piutang Daerah		0.00	0.00	0.00	0.00
79	Penerimaan Kewajiban Pihak Ketiga		0.00	250,000.00	100.00	4,350,000.00
79	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		0.00	0.00	0.00	0.00
80	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		174,757,015,684.91	174,757,265,684.91	100.00	272,350,289,419.35
81	Pembentukan Dana Cadangan					
82	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.5.1.3.2				
83	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0.00	0.00	0.00	0.00
84	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		53,000,000,000.00	53,000,000,000.00	100.00	0.00
85	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0.00	0.00	0.00	0.00
86	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0.00	0.00	0.00	0.00
87	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0.00	0.00	0.00	0.00
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
89	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0.00	0.00	0.00	0.00
90	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
91	Jumlah Pengeluaran		0.00	0.00	0.00	0.00
92			0.00	0.00	0.00	0.00
93			53,000,000,000.00	53,000,000,000.00	100.00	0.00
94	PEMBIAYAAN NETO		121,757,015,684.91	121,757,265,684.91	100.00	272,350,289,419.35
95	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	7.5.1.3.3	(0.00)	238,994,035,090.52	0.00	174,757,015,684.91



Dok. 1

Aktivitas peneliti saat mengumpulkan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran

ADE AYU LESTARI 105721124317 BAB I

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



text-id.123dok.com

Internet Source



123dok.com

Internet Source

turnitin

5%

2%

Exclude quotes

Exclude bibliography



ADE AYU LESTARI 105721124317 BAB II

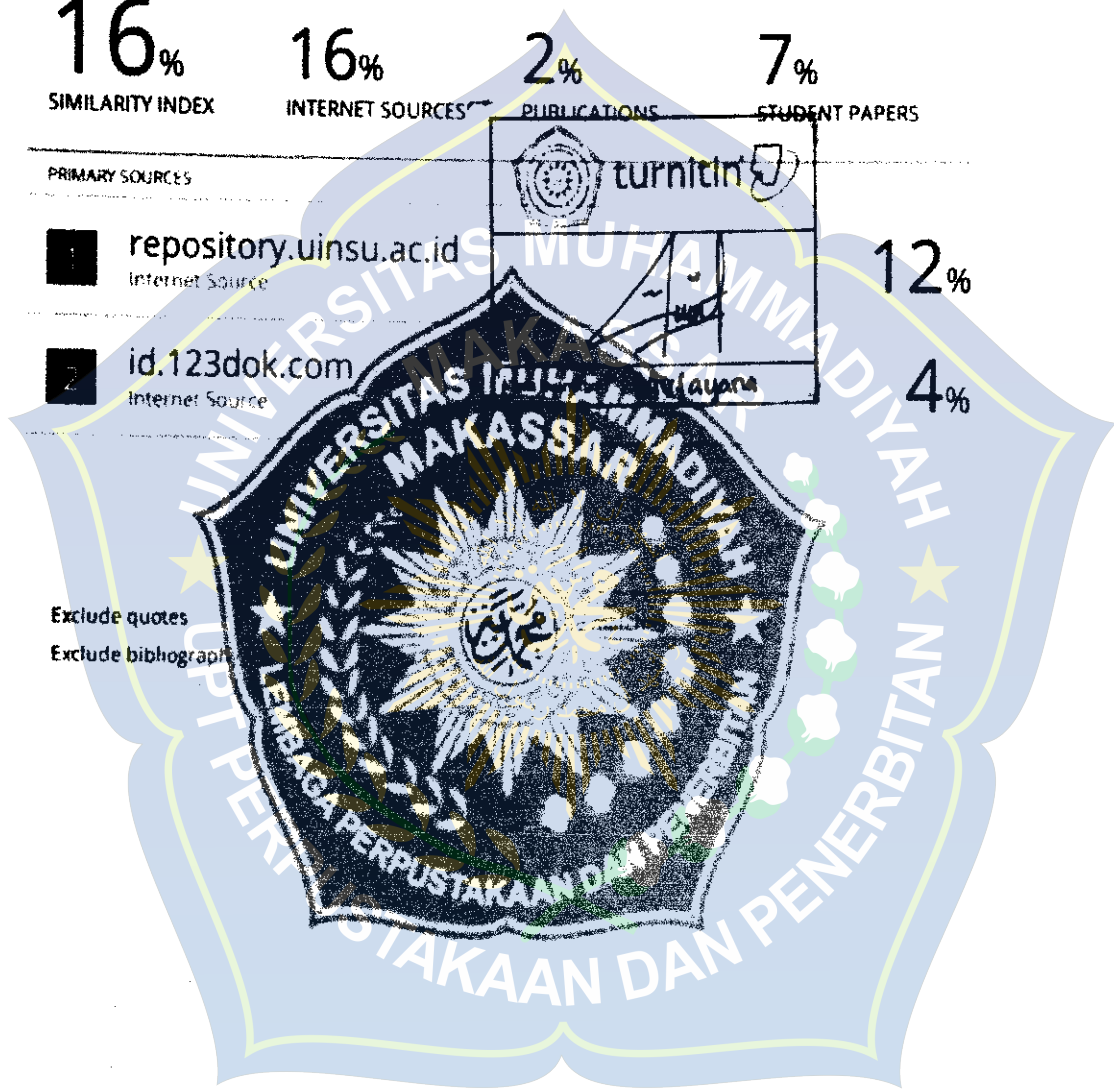
ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

- 1 repository.uinsu.ac.id
Internet Source 12%
- 2 id.123dok.com
Internet Source 4%

Exclude quotes
Exclude bibliography



ADE AYU LESTARI 105721124317 BAB III

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



eprints.umpo.ac.id

Internet Source



bkpsdmd.babel

Internet Source



ejurnal

Internet



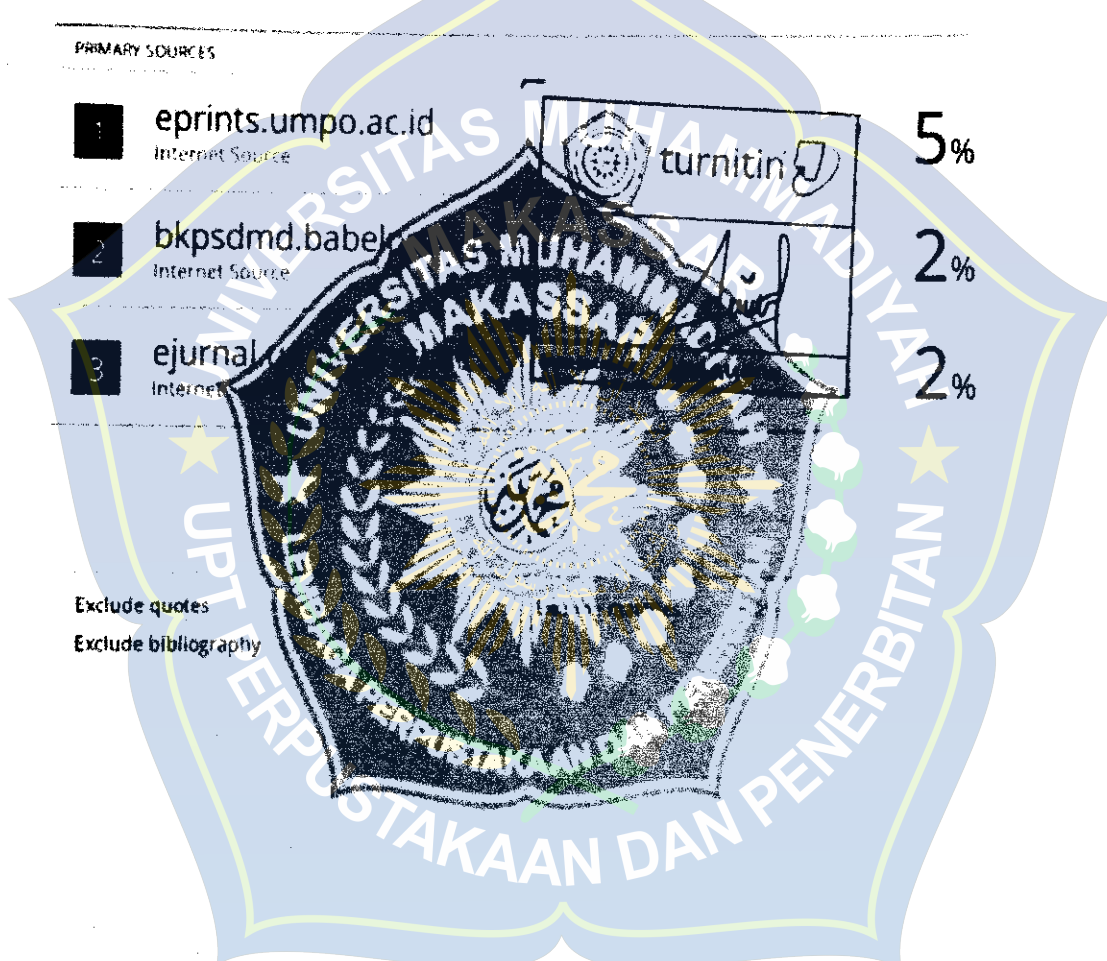
5%

2%

2%

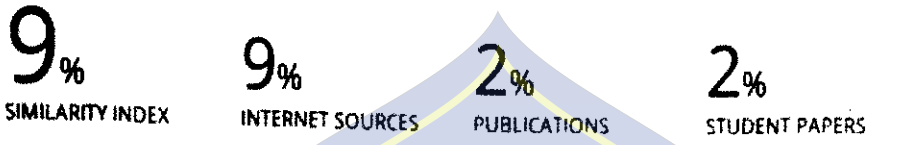
Exclude quotes

Exclude bibliography



ADE AYU LESTARI 105721124317 BAB IV

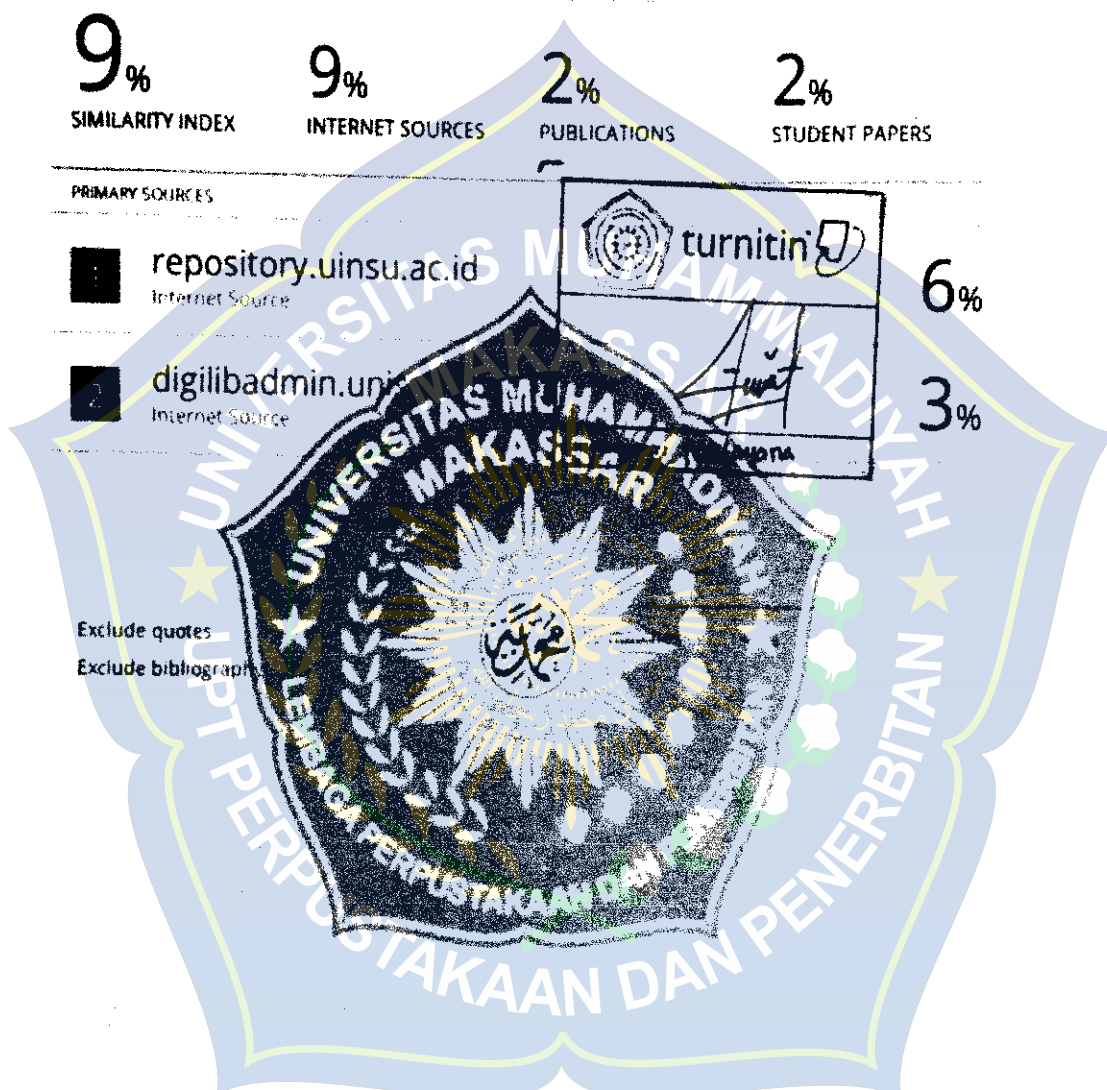
ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES



Exclude quotes
Exclude bibliography



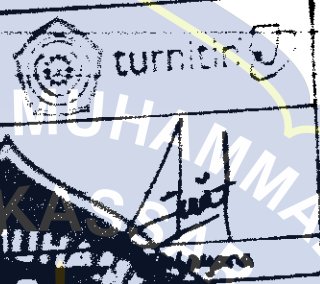
ADE AYU LESTARI 105721124317 BAB V

ORIGINALITY REPORT



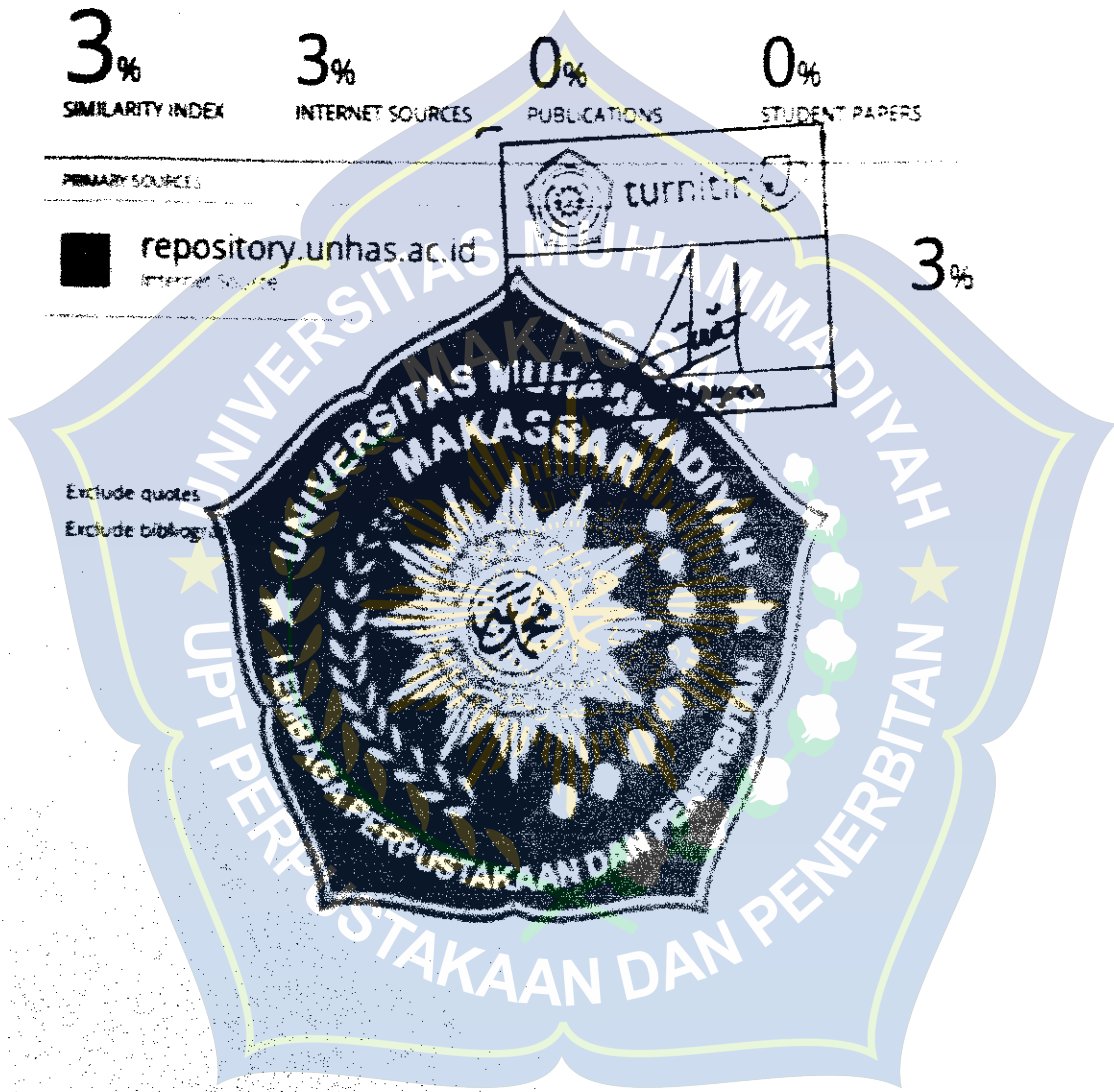
PRIMARY SOURCES

■ repository.unhas.ac.id
Internet Source



3%

Exclude quotes
Exclude bibliography



RIWAYAT HIDUP



Ade Ayu Lestari panggilan Adhe lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 20 April 1999. Merupakan anak kedua dari lima bersaudara dari pasangan H. Andi Mustari Dg. Taba dan Hj. Nurlailah Dg. Pajja. Penulis mengenyam pendidikan Sekolah Dasar (SD) SD INPRES BAROMBONG III pada tahun 2005 sampai tahun 2011, kemudian melanjutkan ke jenjang SMP Negeri 1 Pallangga pada tahun 2011 sampai tahun 2014, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMK Kesehatan Plus Prima Mandiri Sejahtera Makassar dari tahun 2014 sampai 2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan studinya di Universitas Muhammadiyah Makassar dan terdaftar sebagai Mahasiswa di Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEBIS), Universitas Muhammadiyah Makassar, selanjutnya penulis telah menyelesaikan tugas akhir sebagai seorang Mahasiswa dengan judul **"ANALISIS KINERJA KEUANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN"**.